

**STUDI TERHADAP KONSEP EKONOMI KERAKYATAN
MOHAMMAD HATTA MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Disusun Oleh

HINDI JUNAIDI
NIM : 10622003755

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Saudi Terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi ini mengkaji tentang konsep ekonomi dari pemikiran Mohammad Hatta yang dimana akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Mohammad Hatta tentang konsep ekonomi kerakyatan dan bagaimana analisa menurut ekonomi Islam. Untuk meneliti masalah ini, penulis memilih pemikiran Mohammad Hatta tentang konsep ekonomi kerakyatan, karena beliau merupakan salah satu tokoh ekonomi yang banyak menulis karya-karya dalam bidang ilmu ekonomi, dan beliau merupakan seorang tokoh ekonomi yang ada di Indonesia. Yang dimana pemikiran beliau lebih mengutamakan Demokrasi Ekonomi atau rakyat mempunyai kedaulatan dalam hal ber ekonomi.

Sumber data yang dipakai yaitu data primer, sekunder dan tersier, dan analisa datanya dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan komparatif analitik, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan.

Menurut konsep Mohammad Hatta dengan kondisi saat ini, lebih mengutamakan penguatan basis-basis ekonomi rakyat melalui koperasi, hal ini harus lah digalakkan kembali. Yang dimana banyak jaminanjaminan social bagi rakyat, transmigrasi, penguasaan aset nasional yang menyangkut hidup khlayak orang banyak. Dengan masih relevannya pemikiran Hatta dengan kondisi saat ini, menunjukkan bahwa pemikiran Hatta masih sangat visioner.

Sedangkan menurut analisa ekonomi Islam, pemikiran Mohammad Hatta lebih menekankan kepada moral dan akhlak. Pemikirannya dapat dilihat dari dalam dasar-dasar koperasi yang telah dikemukakan Hatta. Dan pemikiran Hatta yang lainnya lebih menekankan kepada nilai keadilan. Bahkan dalam ekonomi Islam keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari keseimbangan dan kepemilikan. Hatta sendiri menawarkan konsep penentuan upah minimum yang adil bagi para pekerja.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Dan Lingkup Penelitian

C. perumusan masalah

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian.....

F. Sistematika Penulisan

BAB U RIWAYAT HIDUP MOHAMMAD HATTA

A. Pribadi dan Pendidikan Mohammad Hatta

B. Aktivitas Sosial dan Politik Mohammad Hatta

C. Pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta dan Karya-karyanya ...

D. Konfigurasi Pemikiran Ekonomi dan
Posisi Ekonomi Mohammad Hatta

BAB HI TINJAUAN UATUM TENTANG EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

B. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

1. Nilai Dasar Kepemilikan.....

2. Keseimbangan

3. Keadilan

C. Nilai Instrumental Ekonomi islam

1. Zakat.....

2. Pelarangan Riba

3. Kerjasama Ekonomi

4. Jaminan Sosial.....

D. Tujuan Ekonomi Islam

BAB IV PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DAN TINJAUANNYA DART PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pemikiran Ekonomi Islam.....

a. Demokrasi Ekonomi

b. Ekonomi Kerakyatan Menurut Mohammad Hatta

c. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
dan Politik Ekonomi Kerakyatan

B. Analisis Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta
di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi baru menjadi disiplin ilmu setelah Adam Smith menulis buku “*An inquiry into the nature and cause of the wealth of nations*” pada tahun 1776.¹ dengan dimulainya abad keduapuluh dan dengan bertambahnya peranan yang dimainkan oleh ekonomi dalam kehidupan, maka mulailah berbagai bangsa mengambil studi-studi ekonomi dalam bentuk-bentuk baru, yang pada akhirnya studi ekonomi tersebut, mengarah pada terbentuknya mazhab-mazhab ekonomi. Studi-studi ekonomi tidak lagi berhenti pada batas observasi dan menguraikan gejala-gejala ekonomi untuk merumuskan hukum-hukum yang merupakan kaidah, melainkan telah memiliki tujuan-tujuan kehidupan perekonomian dan membatasi cara-cara yang perlu ditempuh untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dengan demikian, terpecah-pecahlah mazhab-mazhab ekonomi itu yang berbeda satu sama lain dan terbagi menjadi dua mazhab besar yaitu mazhab kapitalisme dan mazhab sosialisme.²

Pada praktiknya, kedua mazhab ini mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dan begitu fundamental, mazhab kapitalisme menekankan tidak adanya intervensi negara dalam hal perekonomian, negara hanyalah sebuah fasilitator untuk memberikan suasana kondusif bagi sektor-sektor swasta untuk menjalankan roda perekonomian. Sedangkan mazhab sosialisme, yang bisa dibilang merupakan kebalikan dari mazhab kapitalisme, menekankan bahwa perekonomian suatu negara hanya boleh diatur pemerintah. Berbeda dengan mazhab

¹ Euis Amalia, *sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Astaaruss Jakarta, 2005), h. 1

² *Ibid.* h. 13-14

kapitalisme, yang sangat mengakui hak milik pribadi, mazhab sosialisme sangat membatasi hak milik individu bahkan cenderung meniadakan hak milik tersebut dan hanya mengakui kepemilikan bersama (*community*). Aliran sosialisme yang meniadakan hak individu inilah yang sampai saat ini kenal dengan aliran komunisme, yang mana pada praktiknya aliran komunisme ini lebih ekstrem daripada aliran sosialisme.

Kedua mazhab ini menawarkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada dunia dan saling berebut pengaruh dan mengklaim satu sama lain bahwa mazhab mereka masing-masinglah paling benar dan paling ampuh dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, inflansi dan lain-lain sebagainya. Dan tak jarang dalam mengkampanyekan ide-ide tersebut kedua mazhab ini harus berhadapan satu sama lain dalam posisi diametral, bahkan sampai meruncing, dan merembet kemasalah politik hingga konflik. kedua mazhab ini bukanlah mazhab yang tidak pernah gagal dalam menangani masalah perekonomian, sebut saja Amerika Serikat, salah satu penganut mazhab kapitalisme, pernah mengalami depresi besar-besaran pada tahun 1930-an³. Dan juga hancurnya perekonomian Uni Soviet, yang menganut mazhab sosialisme/komunisme yang pada akhirnya mengalami masa-masa yang tragis yaitu dengan bubarinya negara tersebut pada tahun 1980⁴.

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun begitu usaha dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh. Berangkat dari kegagalan tersebut, maka mulai bermunculan berbagai ekonomi alternatif, diantara gagasan ekonomi yang

³ *Ibid.* h. 21

⁴ *Ibid.* h. 22

berdasarkan kerakyatan yang dikenal dengan nama ekonomi kerakyatan, dan ekonomi yang berdasarkan Islam, yang dikenal dengan ekonomi Islam.

Pada dasarnya kedua mazhab tersebut terdapat berbagai persamaan dan pemikiran yang sama, bahkan inti dari kedua mazhab tersebut cenderung sama dan hampir tidak ada perbedaan, yaitu bagaimana harta itu tidak hanya berputar bagi kelompok atau golongan tertentu saja akan tetapi juga harus berputar diseluruh lapisan masyarakat. Retribusi yang adil dalam konsep ekonomi kerakyatan bukanlah mendistribusikan aset fisik/riil, bukan pula membagi-bagikan kegiatan bisnis para konglomerat baik yang sedang sekarat ataupun yang sudah bangkrut, bukan pula merupakan alat untuk memudahkan aset fisik dan kesempatan memperoleh rentetan ekonomi dari aktor-aktor lama ke aktor baru. Retribusi aset dapat diartikan sebagai usaha memberikan kekuasaan dan kesempatan yang adil bagi pengusaha kecil atau menengah dan koperasi untuk melakukan kegiatan dan bisnis. Firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 71 dan Al-Hasyr ayat 7:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (Qs. An Nahl : 71).⁵

Surat AL-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), h. 412

فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(Al-Hasyr : 7).⁶

Prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan keadilan yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai Islam, dan ekonomi kerakyatan pun tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah solusi untuk menuju perekonomian yang diidamakan. Hal ini terbukti, dalam kondisi krisis ekonomi di Indonesia yaitu pada tahun 1997-1998, ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu usaha kecil, menengah dan koperasi terutama dalam kesulitan produksi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat disektor pertanian, tingkat produksi pangan telah berada dalam kondisi yang aman sehingga tingkat impor beras dapat ditekan dan juga subsektor perkebunan yang berorientasi ekspor menunjukkan pertumbuhan positif. Pengalaman ini memberikan alasan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saja penting dari sudut pandang konseptual dalam mewujudkan demokrasi ekonomi tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa UKM dan koperasi sangat berperan dalam usaha penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan aktifitas terutama dimasa krisis.⁷

⁶ *Ibid.* h, 916

⁷ Adi Sasono, *Prospek Dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT Pinbuk, 2000), h. 26

Membangkitkan ekonomi rakyat di Indonesia terutama ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998, usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ekonomi kerakyatan memainkan fungsi penyelamatan disektor kegiatan, fungsi penyelamatan ini terbukti pada sektor penyediaan kebutuhan rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi⁸. Sehingga dengan adanya pengalaman-pengalaman serta prestasi-prestasi tersebut, diharapkan dalam masa-masa yang akan datang pemerintah mau untuk lebih memperhatikan dan mulai melirik ekonomi kerakyatan.

Berbicara tentang ekonomi kerakyatan, tentu tidak pernah lepas dari sosok Mohammad Hatta. Sosok yang dikenal dengan nama akrab Bung Hatta ini merupakan adalah salah seorang pelopor ekonomi berasaskan kerakyatan di negeri ini. Hatta, yang merupakan proklamator negeri ini, dalam mengemukakan pemikiran-pemikirannya, baik itu lewat pidato, tulisan, ataupun buku-buku yang dikarang sendiri oleh beliau, takkan pernah melepaskan perhatiannya dan selalu memberikan *stressing* pentingnya ekonomi berasaskan kerakyatan dengan koperasi sebagai instrumennya. Hatta dijuluki sebagai bapak ekonomi koperasi di negara ini⁹. Hatta pernah mengungkapkan ide ekonomi yang berdasarkan kerakyatan antara lain: “perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dimaksudkan akan mematikan perusahaan yang kecil-kecil yang hanya dapat dikerjakan oleh orang-seorang saja dan tiada menyinggung keperluan umum. usaha bersama dilakukan terhadap kepada penghasilan yang benar-benar yang mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya. Disentralisasi ekonomi dilakukan dengan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian. Jadinya Indonesia ibarat satu taman yang

⁸ *Ibid.* h. 32

⁹ Yayasan Idayu, *Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, (Jakarta : PT. Idayu Press. th), h. 13

berisi suatu pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak. Jadinya, bukan koperasi yang bersaing satu sama lain mencari untung besar, melainkan yang bekerja bersama-sama untuk membela kebutuhan rakyat semuanya dan keperluan umum seperti pelajaran, seni dan lain-lain”.¹⁰

Untuk membangkitkan ekonomi kerkayatan itu, Hatta juga menyatakan, bahwa koperasi adalah suatu alat yang sangat efektif untuk membangun ekonomi kerkayatan. Seperti yang dikatakannya : “koperasi pada selanjutnya, mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar “*self-help*”. Dengan koperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya kelapangan perekonomian yang besar. Tenaga-tenaga ekonomi yang lemah lambat laun disusun menjadi kuat. Koperasi dapat pula menyelenggarakan pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat, dengan jalan simpan sedikit demi sedikit tapi teratur. Sebab itu koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terbelakang. Koperasi merasionalkan perekonomian, karena menyingkatkan jalan antara produksi dan konsumsi. Dengan adanya koperasi-produksi dan koperasi-konsumsi yang teratur dan bekerja baik, perusahaan-perantara yang sebenarnya tidak perlu, yang hanya membesarkan ongkos dan memahalkan harga dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir itu, dapat dialirkan kepada bidang produksi yang lebih produktif. Karena itu produsen memperoleh upah yang pantas bagi jerihnya dan konsumen membayar harga yang murah”.¹¹

¹⁰ Swasono, *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta : Yayasan Hatta, 2002), h. 201

¹¹ *Ibid.* h. 202-203

Demikianlah sedikit gambaran pandangan ekonomi Hatta. Pandangan ekonomi Hatta ini menekankan asas kerakyatan, kekeluargaan dan sarat dengan nilai dan moral. Dan dengan berdasarkan latar belakang pemikiran dan argumen-argumen di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang aspek-aspek pemikiran ekonomi Mohammad Hatta serta ingin membandingkan dari sudut pandangan ekonomi Islam. Oleh karena itu dalam hal ini, penulis memberi judul skripsi ini dengan “Studi Terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Batasan dan Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memfokuskan pembahasan dan mengambil **STUDI TERHADAP KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta?
2. Bagaimanakah ekonomi kerakyatan menurut pemikiran Mohammad Hatta ditinjau menurut Ekonomi Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pandangan dan pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta
- b. untuk mengetahui apakah pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta sudah sesuai menurut tinjauan ekonomi Islam

2. Manfaat penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Bagi penulis, untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi pengembangan disiplin ilmu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan bahan masukan pada pengembangan disiplin ilmu.

E. Metode Penelitian

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi. Bilamana terdapat ilustrasi yang mengarah pada penghitungan yang berbentuk angka-angka (kuantitatif), maka hal ini dimaksudkan hanya untuk mempertajam analisa dan menggunakan argumentasi penelitian.

Secara keseluruhan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian ekonomi normatif. Bilamana terdapat data-data empiris, maka hal ini dimaksudkan hanya untuk mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian dibawah ini:

1. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada dipergustakaan. Sumber data tersebut diklarifikasikan menjadi tiga macam, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Yaitu:

a. Bahan Primer

Adapun menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah semua karya ilmiah Mohammad Hatta yang berjudul “Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Demokrasi Untuk Indonesia dan Koperasi”.

b. Bahan Sekunder

Berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan seperti : “*ekonomi kerakyatan indonesia*” Karangan Sritua Arif, “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*” Karangan Yusuf Qardhawi, dan buku-buku ekonomi lainnya baik klasik maupun kontemporer yang memberikan pembahasan tentang ekonomi kerakyatan.

c. Bahan Tersier

Yakni bahan-bahan yang membicarakan tentang persoalan-persoalan ekonomi dan keislaman lainnya seperti ensiklopedia hukum Islam, makalah dan sebagainya.

Agar diperoleh pengetahuan yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah study kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku ilmiah, literatur, media cetak dan atau semua bahan tertulis lainnya, termasuk karya ilmiah yang diakses dari internet. Data deskriptif mengenai Mohammad Hatta yang didapatkan dari berbagai literatur akan disusun ulang hingga dapat menyatu dengan teks-teks atau pembahasan skripsi.

3. Teknik Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan deskriptif analitik. Deskriptif berarti teknik analisa dengan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Mohammad Hatta perihal konsep ekonomi kerakyatan secara apa adanya tanpa ada interpretasi dari penulis.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka sistematika penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan lingkup penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II RIWAYAT HIDUP MOHAMMAD HATTA DAN GENEALOGI PEMIKIRAN EKONOMINYA

Bab ini terdiri pribadi dan pendidikan Mohammad Hatta, aktivitas sosial dan politik Mohammad Hatta, pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta dan karya-karyanya, konfigurasi pemikiran ekonom dan posisi pemikiran ekonomi Mohammad Hatta.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI ISLAM

Bab ini terdiri pengertian ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, nilai-nilai instrumental ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam.

BAB IV PEMIKIRAN EKONOMI MOHAMAD HATTA DAN TINJAUANNYA DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bab ini terdiri dari pemikiran ekonomi Mohammad Hatta dan ekonomi kerakyatan menurut pemikiran Mohammad Hatta ditinjau menurut ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

RIWAYAT HIDUP MOHAMMAD HATTA

A. Pribadi dan Pendidikan Mohammad Hatta

Mohammad Hatta dilahirkan di bukit tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Bukittinggi adalah sebuah kota kecil yang terletak ditengah-tengah dataran tinggi Agam¹. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika hatta berusia delapan bulan. Ia berasal dari batu hampar, kira-kira 16 km dari Bukittinggi arah Payakumbuh. Ibunya bernama saleha, dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.² Orang tua Mohammad Hatta mula-mula memberikan nama Mohammad Athar kepadanya. Athar sendiri artinya “harum”. Namun, karena orang-orang tua dan dilingkungannya sulit menyebutkan nama Athar, maka sehari-hari ia dipanggil “Atta” yang kemudian berkembang menjadi sebuah nama baru, “Hatta”.³

Di masa kecil, Hatta berkembang seperti anak biasa, tetapi ia kurang memiliki sahabat bermain karena para tetangga sekitarnya tidak mempunyai anak seusianya dan di keluarganya. Hatta merupakan satu-satunya anak laki-laki. Selain itu, Hatta adalah seseorang yang hemat. Setiap kali jika orang tuanya memberi uang belanja kepadanya, yang pada waktu itu seenggol, lalu uang itu ditabunnya. Caranya, uang logam itu disusun sepuluh-sepuluh dan disimpan dimejanya. Jadi, setiap orang yang mengambil atau mengusiknya,

¹ Mohammad Hatta, *Memoir*, (J 14 Gintamas Indonesia, 1979), h. 1.

² http://ms.wikiipedia.org/wiki/l_Hatta.

³ Meutia Farida Swasono (Penyunting), *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*, (Jakarta : Sinar Harapan Bekerja sama dengan Universitas Indonesia, 1980), h. 5.

Hatta selalu tahu. Namun, kalau orang meminta dengan baik dan Hatta menganggap perlu diberi, tak segan-segan ia akan memberi apa yang dimilikinya.⁴

Sebagai seorang muslim, sejak kecil Hatta rajin sembahyang. Mula-mula dia belajar dari lingkungan keluarga. Dan setelah remaja, dia mulai belajar di Surau dengan guru ngaji. Di zaman masa kemerdekaan, setiap kali berada ditahanan, Hatta tidak pernah melupakan sembahyang, puasa pun selalu ia jalankan. Dan satu lagi merupakan kebiasaan yang unik dari Hatta adalah bahwa disekitarnya selalu terdapat buku. Buku, sudah menjadi bagian dari hidupnya.⁵

Lalu dalam hal bersekolah, Hatta menempuh berlainan dari niat yang dikandung keluarga ayahnya di Batu Hampar. Keluarga ayahnya ini menginginkan sekali agar Hatta melanjutkan pelajaran agama bila telah menyelesaikan Sekolah Rakyat 5 tahun, maksud mulanya ke Mekkah, kemudian ke Mesir. Untuk keperluan ini persiapan pun dilakukan, tetapi setelah dua tahun belajar di Sekolah Rakyat Bukittinggi, Hatta pindah ke Sekolah Belanda ELS (*Europeesche Lagere School* – Sekolah Dasar untuk orang-orang kulit putih) di kota itu juga, kemudian ke ELS Padang (Mulai kelas 5 sampai kelas 7). Kepindahan ke Padang ini, yang terjadi tahun 1931, disebabkan oleh keinginan pihak keluarga Ibu agar Hatta memperoleh pelajaran bahasa Prancis (disamping bahasa Belanda) yang mulai diajarkan di kelas 5. Ketika di Bukittinggi Hatta telah mulai belajar bahasa Inggris secara privat, yang terpaksa berhenti karena gurunya pindah ke Jakarta. Ia mulai belajar bahasa Prancis tetapi masih juga bersifat privat, sedangkan sekolah yang di Padang pelajaran itu diberikan dalam rangka kurikulum. Sekolah di ELS ini diselesaikan Hatta tahun 1931. Pada

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

awalnya, Hatta berniat meneruskan studinya ke HBS (*Hogere Burger School*- sekolah Menengah belanda 5 tahun), dan ia memang telah lulus ujian masuk disini. Tetapi untuk memasuki sekolah tersebut, berarti Hatta harus pindah ke Jakarta, dan terhadap hal ini ibunya keberatan karena Hatta baru berumur 14 – 15 tahun ketika itu, oleh sebab itu, ia beralih ke MOLU (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*- setingkat Sekolah Menengah Pertama) yang ia tamatkan pada tahun 1919. Ada juga godaan pada Hatta untuk bekerja pada kantor pos dengan gaji f 65 sebulan, tetapi niat ini dibatalkan atas bujukan ibunya.⁶

Baik di Bukittinggi maupun ketika sekolah dipadang. Hatta disamping sekolah di pagi hari, juga mengaji. Ia beruntung mendapatkan di kedua kota itu guru – guru yang berpandangan luas dan maju dalam pelajaran agama Islam, masing – masing Haji Muhammad Djamil Djambek (1860 – 1933). Dan Haji Abdullah Ahmad (1878 – 1933). Pengkajian yang agak intensif mengenai agama Islam di lakukannya selama di Bukittinggi dengan Syaikh Djambek dimana ia telah mulai mempelajari bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf) agar mudah mempelajari Fiqih dan Tafsir. Sayang ketika sudah pindah ke Padang, pelajaran seperti ini tidak dilanjutkannya. Baru setelah belajar di MOLU ia bisa menerima lagi pelajaran ke Islaman secara lebih teratur dibawah asuhan Haji Abdullah Ahmad.⁷

Pada tahun 1919, Hatta pergi ke Jakarta (yang dulu bernama Batavia) untuk bersekolah di PHS (*prins Hendrik Handels School*- sekolah Dagang Prins Hendrik). Studinya di PHS itu sendiri ia selesaikan dengan tertib, umumnya juga tanpa kesulitan. Hatta merasakan pengembangan pemikirannya dengan cara – cara para guru di PHS memberikan pelajarannya yang lebih mengutamakan pengembangan dan bukan penghapalan. Dan pada

⁶ Deliar Noer, *Muhammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 21.

⁷ *Ibid.*

tahun 1921 ia menyelesaikan studinya di PHS dengan menempati urutan (raangking) ketiga. Pada saat itulah ia kembali cenderung terpengaruh oleh godaan untuk bekerja dengan gaji permulaan f 350. Guru – gurunya di PHS pun, kecuali seorang, menganjurkan agar ia segera saja mempraktikkan pengetahuan yang diperolehnya dari sekolah.⁸

Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Walaupun paman nya Ayub Rais yang menjanjikan bantuan kepadanya telah jatuh pailit, ia akan berusaha dengan bekal yang ada, dan ia juga mengharapkan bantuan berupa beasiswa dari pihak Belanda. Kalangan pedagang di Padang yang bergabung dalam Serikat Usaha turut juga membantunya.⁹ Dan akhirnya pada tahun 1921 Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda. Untuk belajar ilmu Perdagangan / Bisnis di *Nederland Handelschogeschool* (bahasa Inggris : *Rotterdam School of Commerce*, kini menjadi *Erasmus University*). Dan dinegeri ini, ia kemudian tinggal selama 11 tahun.¹⁰

Pada tahun 1923, Hatta lulus dalam ujian *Handels-Economie*. Mula – mula Hatta bermaksud akan menempuh ujian doktoral ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Akan tetapi pada tahun 1925 di Rotterdam diadakan cabang baru dalam pelajaran doktoral, yaitu “*Staatskunding – Economische richting*” di mana Hukum Negara dan Hukum Administratif menjadi konsentrasi utama disamping ekonomi, maka Hatta pun tertarik untuk memasuki jurusan baru tersebut. Menurut pendapatnya, ia tidak akan rugi kalau menyambung lagi pelajarannya yang hampir tamat itu kejurusan yang baru. Dengan memperpanjang studi satu atau satu setengah tahun lagi, ia akan memperoleh perlengkapan yang lebih sempurna untuk menjalankan kewajibannya terhadap tanah air dimasa datang, dan ia merencanakan akan

⁸ *Ibid*, h. 31.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ http://ms.wikiipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta.

menempuh ujian doktoralnya pada akhir tahun 1926 atau awal tahun 1927.¹¹ Akan tetapi, karena kesibukannya sangat padat, Hatta baru menyelesaikan studinya pada pertengahan tahun 1932.¹²

Selama menjadi Wakil Presiden, Hatta tetap aktif memberikan ceramah – ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku – buku ilmiah dibidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita – cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia pada kongres koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”.¹³

Pada tanggal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “ Lampau dan Datang “. Sesudah Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI Hatta memperoleh beberapa gelar akademis dari berbagai Perguruan Tinggi antara lain, Universitas Padjajaran di Bandung mengukuhkan Hatta sebagai Guru Besar dalam Ilmu Politik Perekonomian, Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang juga memberikan gelar Doctor Honoris Causa

¹¹ Mohammad Hatta, *Koperasi Membangun dn dan Membangun Koperasi*, (Jakarta : PT. Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya, 1971), h. 24.

¹² *Ibid*, h. 27.

¹³ *Ibid*.

dalam bidang ekonomi, Universitas Indonesia juga memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang Ilmu hukum.¹⁴

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal 18 November 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Ferida, Gemala Rabi'ah, dan Halidah Nuriah. Hatta seorang proklamator kemerdekaan dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di rumah sakit Dr. Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.¹⁵

B. Aktivitas Sosial dan Politik Mohammad Hatta

Hidup Mohammad Hatta pada waktu mudanya hampir sejalan dengan timbulnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Keadaan inilah yang menjadi dorongan bagi dirinya dalam usia yang sangat muda, yaitu saat duduk dibangku sekolah menengah (MULO), telah tertarik kedalam pergerakan. Pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Budi Utomo dalam tahun 1908, dan berkobar sejak tahun 1913, membuka hati Pemuda Indonesia untuk menyadari kewajiban mereka terhadap Tanah Air. Berturut – turut dari tahun 1916 lahirlah perkumpulan – perkumpulan pemuda, seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Minahasa* dan *Jong Ambon*. Dengan sendirinya Mohammad Hatta yang berjiwa pengabdian dibawa kepada perkumpulan *Jong Sumatranen Bond* (JSB).¹⁶

Dalam organisasi JSB ini mula – mula Hatta menjadi bendahara. Sebagai bendahara, Hatta menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan, sumber keuangan

¹⁴ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mohammad Hatta, *Op.cit.* h. 31.

baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya bisa berjalan lancar kalau anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin inilah selanjutnya menjadi ciri khas sifat – sifat Hatta¹⁷. Kemudian setahun berikutnya Hatta diangkat menjadi sekretaris sekaligus merangkap bendahara cabang Padang. Ini berarti bahwa Hatta telah berhasil menempatkan dirinya diantara kawan – kawan sebagai orang yang bisa dipercaya baik dalam memegang urusan keuangan, maupun memutar roda organisasi.¹⁸

Sebagai pengurus *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang. Hatta mulai mempertajam pengetahuannya mengenai perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya membaca berbagai koran, bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat itulah Hatta mulai mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar “Utusan Hindia”, dan Agus Salim dalam “Neratja”. Kesadaran politik pun Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah – ceramah atau pertemuan – pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis (Tokoh Sarekat Islam).¹⁹

Kemudian pada saat itu usia Hatta menginjak 17 tahun, ia pun turut aktif di pengurusan pusat *Jong Sumatranen Bond* (JSB) pada saat itu bersekolah di Jakarta. Dalam perkumpulan JSB ini ia terpilih menjadi bendahara pada perkumpulan tersebut. Hatta pun bersedia menjadi bendahara itu tapi hanya untuk jangka waktu satu tahun, karena dalam tahun 1921 ia akan menghadapi ujian akhir di sekolahnya. Tetapi walaupun hanya setahun, ia berhasil menertibkan administrasi, terutama keuangan perkumpulan²⁰.

¹⁷ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml>.

¹⁸ Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 21.

¹⁹ <http://www.grelovejogja.wordpress.com/2006/12/09/mohammad-hatta/>.

²⁰ *Ibid*, h. 25.

Satu keuntungan lagi menjadi pengurus JSB di Batavia ialah bahwa hal itu membuat wawasan Hatta semakin luas dan Hatta pun jadi memiliki akses langsung kepada para pemimpin Sarekat Islam yang orang Minang Kabau, seperti Abdul Moeis dan Haji Agus Salim²¹ dan juga selama menjabat bendahara JSB pusat tersebut, Hatta juga menjalin kerja sama dengan percetakan surat kabar “Neratja”. Hubungan itu terus berlanjut meski Hatta berada di Rotterdam, ia dipercaya sebagai koresponden²².

Lalu pada tahun 1921, pada saat Hatta berkuliah di Belanda, ia mulai menerjunkan dirinya ke dalam *Indische Veriniging* (Perhimpunan Hindia), sebelumnya, *Indische Veriniging* yang berdiri pada tahun 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai *Indische Veriniging* semenjak tibanya tiga tokoh *Indische Partij* (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai eksterminasi akibat kritik mereka lewat tulisan di koran De Expres. Kondisi itu tercipta tak lepas karena Suwardi Suryadiningrat (Ki Hajar Dewantara) menginisiasi penerbitan majalah Hindia Poetra oleh *indische Veriniging* mulai 1916. Hindia Poetra bersemboyan “Makmurlah Tanah Hindia! Kekallah Anak Rakyatnya!” berisi informasi bagi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara, tak ketinggalan pula tersisip kritik terhadap sikap kolonial Belanda.²³

Hatta mengawali karir pergerakannya di *Indische Veriniging* pada 1922, lagi-lagi sebagai bendahara. Penunjukan itu berlangsung pada 19 Februari 1922, ketika terjadi pergantian pengurus *Indische Veriniging*. Ketua lama Dr. Soetomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Momentum suksesi kala itu punya arti penting bagi mereka dimasa yang akan

²¹ Mavis Rose, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 17.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

datang, sebab ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama *Indische Veriniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia) dan kelanjutannya mengganti nama *Nederland Indie* menjadi Indonesia. Sebuah pemilihan nama bangsa yang sarat bermuatan politik. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota *Indonesische Vereeniging* mengatakan bahwa dari sekarang kita mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau *Nederland Indie*.²⁴

Kemudian pada tanggal 17 Januari 1926, Hatta secara resmi terpilih menjadi ketua PI. Dan jabatan ketua tersebut diterimanya dengan mengucapkan pidato "*Economische wereldbouw en Machtstegenstellingen* – Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan", yang mengupas secara ilmiah apa sebab – sebab pertentangan si penjajah berkulit putih dan yang terjajah yang berkulit berwarna, bagi sikulit berwarna apabila ia benar – benar mau merdeka, harus menjalankan politik non kooperasi. Pertentangan sikulit putih dan sikulit berwarna akan bertambah hebat, (yang waktu itu pada tahun 1926) sudah tampak tanda – tanda yang menjurus kesana. Pada akhir pidato Hatta juga mengucapkan bahwa meruntuhkan penjajahan sikulit putih atas kulit berwarna adalah tugas peradaban. Dan pertentangan itu akan berakhir kelak dalam suatu perang Pasifik dimana sikulit berwarna akan memperoleh kemenangan, kemudian baruah penjajahan akan berakhir. Waktu mengucapkan pidato itu, Hatta mungkin tidak akan menduga bahwa perang Pasifik itu terjadi setelah pidatonya itu dan membawa kemerdekaan empat tahun sesudah itu.²⁵

Sejak itulah sampai 1930, berturut – turut Hatta terpilih menjadi ketua PI. Dibawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mohammad Hatta, *Op.cit.* h. 35.

politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berda di Eropa.²⁶

PI melakukan propaganda aktif diluar negeri Belanda. Hampir setiap kongres Internasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi. Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama Indonesia, Hatta memimpin delegasi ke kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian, di Bierville, Prancis. Dalam kongres ini Hatta berhasil menuntut pengakuan sidang untuk mempergunakan kata “Indonesia” dan bukan “Hindia Belanda”, sehingga baik dalam tulisan sehubungan dengan kongres itu maupun dalam pembicaraan-pembicaraan, kata “Indonesia” ini di pergunakan. Sejak saat itulah nama Indonesia mulai dikenal oleh organisasi – organisasi internasional.

Pada tahun berikutnya (10-15 Februari 1927), Hatta bersama Nazir Pamontjak, Ahmad Subardjo, Gatot Tanumihardja dan Abdul Manaf (yang terakhir ini mahasiswa ini dari mesir) menghadiri kongres Internasional menentang kolonialisme di Brussel. Perumusan ini bukan hanya mewakili PI melainkan juga mewakili Konsentrasi Nasional di Indonesia. Bersama Semaun, wakil dari sarekat Rakyat, mereka semua mewakili Indonesia. Wakil-wakil Indonesia ini memiliki peran penting dalam kongres dapat dilihat dengan duduknya Hatta dan Semaun dalam presidium kongres. Kemudian ketika dalam sidang akhir dalam kongres dibentuk suatu organisasi, yaitu Menentang Imprealisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional (*Liga Tegen Impreaisme, Tegen Koloniale Onderdrukking en*

²⁶ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml>.

voor Notionale Onafhankelijkheid). Hatta terpilih dalam badan eksekutifnya. Di kongres ini, Hatta juga berkenalan dengan pemimpin-pemimpin gerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Sengor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu. Dalam kongres tersebut dapatlah dikatakan bahwa kesempatan tersebut memperluas wawasan Hatta, baik dalam pergaulan maupun pengenalan masalah²⁷.

Pada tahun 1927 itu pula Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi “Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian Dan Kebebasan” di Glan, Swiss. Judul ceramah Hatta *L ‘Indonesie et Son Problem de l’ Independence*” (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan).²⁸

Aktivitas dan sepak terjangnya yang bisa dibilang fenomenal, tak pelah membuat resah pihak Belanda. Akhirnya bersama Nazir St. Pamontjak, Ali Sastromidjojo dan Abdul Madjid Djojoadingrat. Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama “*Indonesia Vrij*”, yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul “Indonesia Merdeka”.²⁹

²⁷ *Ibid*, h. 66.

²⁸ Mavis Rose, *Op.cit.* h. 23.

²⁹ *Ibid*.

Sekembalinya ke Indonesia, pada tahun 1932, kegiatan politik Hatta semakin meningkat. Karir politik Hatta di Indonesia diawali dengan bergabung ke Pendidikan Nasional Indonesia (yang disebut PNI-Baru).³⁰

Pada bulan Februari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, pemerintah kolonial Belanda mengalihkan perhatian nya kepada PNI-Baru. Para pemimpin Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Bondan, Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, soeka, dan murwoto. Sebelum Digoel, mereka dipenjara hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta.

Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan – kawannya dibuang ditanah Merah, Boven Digoel (Papua). Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti Van Langen, memberitaukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindak ke Bandaneira. Pada tahun 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu dengan Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tata buku, politik, dan lain-lain.³¹

Waktu tentara Jepang mendarat di Ambon, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi, pada tanggal 3 Februari 1942. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta. Dan sebagai salah seorang yang mempunyai pengaruh, Hatta diminta untuk bekerja

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* h. 45.

sama menyebarkan ide-ide Jepang. Namun keinginannya untuk memerdekakan Indonesia, membuat Hatta lebih banyak mengambil sikap diam.

Ketika tentara Jepang mengalami keterdesakan pada perang di Pasifik, maka pengawasan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia pun semakin longgar. Demikianlah setelah janji Indonesia merdeka diberikan, walaupun tak jelas kapan, pemerintah mendirikan badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan segera mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 2 Juni 1945. Sidang kedua diadakan pada tanggal 10 -16 Juli 1945. Dan pada awal Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah dari seluruh Indonesia, sembilan dari pulau Jawa dan dua belas orang dari luar pulau Jawa.³²

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (sekarang jalan Imam Bonjol). Panitia kecil terdiri dari 5 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno menuliskan kata-kata yang akan didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai, mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti. Soekarni mengusulkan agar naskah teks proklamasi tersebut ditanda tangani oleh dua orang saja, Soekarno dan Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.

³² *Ibid.*h. 198

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat jam 10.00 pagi di Jalan Pangarsa Timur 56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa presiden dan wakil presiden harus merupakan dwi tunggal.

Periode mempertahankan Indonesia. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.

Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli 1947, Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi, dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah. Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum. Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Indonesia pun sepenuhnya terbebas dari belenggu penjajahan dan ditandai dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari pemerintah Belanda. Hatta yang mengetuai delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pun menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana.

Hatta juga menjadi perdana menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hatta kembali menjadi wakil presiden pada periode 1950 – 1956. Pada tahun 1955, Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan

diri sebagai wakil presiden. Niatnya mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua parlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat diberikan kepada presiden Soekarno. Setelah knstituante dibuka secara resmi oleh presiden, wakil presiden Hatta mengemukakan kepada ketua parlemen bahwa pada tanggal 1 Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden RI. Presiden Soekarno mencoba mencegahnya, tetapi Hatta tetap pada pendiriannya.

C. Pemikiran – Pemikiran Mohammad Hatta dan Karya-Karyanya

Secara pribadi Hatta tidak hanya seorang pilitikus tetapi lebih dari itu dia adalah seorang cendikiawan yang tulen, terutama dibidang ekonomi dan hukum Tata Negara. Hal itu tidak lah mengherankan karena semasa Hatta kuliah, ia mengambil jurusan dibidang tersebut. Dalam bidasng ekonomi, Hatta mengeluarkan gagasan mengenai penerepan demokrasi tidak hanya dibidang politik saja, seperti yang diterapkan oleh negara-negara barat. Tetapi juga demokrasi ekonomi, diamana kekayaan suatu negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, tambang tidak dikuasai oleh orang – perorangan atau golongan tertentu, tetapi dalam masalah ini rakyat pun mempunyai hak untuk turut serta menikmati kekayaan alam yang ada di negeri ini. Dan pemikiran ekonomi Hatta lainnya, yang juga terbilang fenomenal adalah membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pedagang-pedagang kecil melalui jalan koperasi. Dalam mengeluarkan gagasan terlihat bahwa Hatta mengambi demokrasi ini sebagai titik tolak pemikiran-pemikiran ekonomi Hatta

lainnya³³. Adapun mengenai penjelasan pemikiran ekonomi Hatta akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

Adapun pemikiran Hatta dalam bidang ketatanegaraan lainnya adalah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, untuk menguasai kekacauan karean timbulnya pemberontakan-pemberontakan pada waktu itu dan juga untuk memberikan perasaan aman dann tentram kepada rakyat.³⁴ Menurut Hatta, titik berat pelaksanaan otonomi bukan pada tingkat provinsi waktu itu Rancangan Undang-Undang (RUU) sedang digodok oleh DPR, pelaksanaan otonomi daerah di tingkat provinsi adalah sebuah konstruksi yang salah dan lebih menyerupai sistem hirarki Hindia Belanda dahulu. Hatta berpendapat apabila Indonesia mau mendekatkan demokrasi yang bertanggung jawab kepada rakyat, melaksanakan cita-cita lama yaitu “pemerintahan dari yang diperintah” , maka sebaiknya titik berat otonomi daerah diletakkan di tingkatan kabupaten, provinsi dalam hal ini hanyalah menjadi badan koordinasi dari semua kabupaten yang berada didalam lingkungannya. Dengan menitik beratkan otonomi daerah pada kabupaten, maka kabupaten dapat memimpin perkembangan otonomi desa secara berangsur-angsur, sampai juga didesa tercapai mengurus rumah tangga nya sendiri.

Pemikiran Hatta dalam bidang politik adalah keharusan politik non-koperasi sebagai satu-satu nya strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, karena kemerdekaan tidak akan diberikan oleh pihak penjajah kepada pihak yang terjajah, hal itu telah dibuktikan oleh pelanggaran janji yang tidak dilakukan Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada November 1918. Selain itu, untuk menuju Indonesia merdeka, rakyat harus

³³ Lihat Mohammad Hatta(Emil Salim,dkk.Penyunting), *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid I Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 17.

³⁴ Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta:PT Toko Gunung Agung,2002), h. 12.

diberikan kesadaran bersama akan kemerdekaannya, dengan jalan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi rakyat. Dalam memberikan kesadaran ini ia berbeda dengan Soekarno yang lebih menekankan rapat-rapat akbar. Pemikiran Hatta di bidang politik yang lain adalah penerapan politik bebas aktif, dalam pidatonya kepada Badan Pekerja Komite Nasional (KNP) pada tanggal 2 September 1948, ia mengatakan :

“Mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia dan Pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah supaya kita menjadi objek dalam pertarungan Internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang harus berhak menentukan nasib kita sendiri. Berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.”³⁵

Pidato inilah yang dianggap merupakan peletakan dasar politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu politik bebas dan aktif, “bebas” karena Indonesia tidak ingin bersekutu dengan salah satu blok-blok yang bertentangan, blok Barat dan Blok Komunis. “aktif” maksudnya negara ini berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB.

Selain itu terdapat juga pemikiran mengenai keisaman Hatta, walaupun tidak banyak. Hatta mengungkapkan bahwa orang Islam yang mengerjakan ibadah, membaca surat Al-Fatihah tidak kurang dari 17 kali sehari, siapa yang memahami isi dan memaknai surat Al-Fatihah sedalam-dalamnya, disitu mendapat pimpinan tentang apa seharusnya tujuan hidupnya dan caranya ia harus berjuang di atas jalan Allah dan dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk berjuang.³⁶

³⁵ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan*. (Jakarta: UI Press, 1980), h.

³⁶ Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato III*, (Jakarta : Toko Buku Gunung Agung, 2002), h. 36.

Adapun semua pemikiran – pemikiran Hatta dituangkan dalam bentuk karya-karya tulis antara lain :

1. Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan
2. Beberapa Fasal Ekonomi Jilid I, jalan Ekonomi dan Koperasi
3. Beberapa Fasal Ekonomi Jilid II, Jalan Ekonomi dan Bank
4. Kumpulan Karangan I, II, III
5. Kumpulan Pidato I, II, III
6. Alam Pikiran Yunani
7. Pengantar Kejalan Ekonomi Sosiologi
8. Pengantar Kejalan Ekonomi Perusahaan
9. Tanggung Jawab Moral Kaum Intelegensia
10. Sekitar Proklamasi
11. Karya Lengkap Bung Hatta Jilid I Kebangsaan dan kerakyatan
12. Karya Lengkap Bung Hatta jilid II Kemerdekaan dan demokrasi
13. Karya Lengkap Bung Hatta Jilid Iii Perdamaian Dunia Dan Keadilan Sosial
14. Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia
15. Bank Dalam Masyarakat Indonesia
16. Ekonomi Terpimpin
17. Memoir

D. Konfigurasi Pemikiran Ekonomi Dan Posisi Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta

Persoalan ekonomi sesungguhnya sama tua nya dengan keberadaan manusia itu sendiri dan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan masalah ekonomi pun terus mengalami

perkembangan. Bukti yang paling konkrit adanya pemikiran ekonomi dimulai dari masa Yunani Kuno, yang mana ketika itu pemikiran mengenai ekonomi digagas oleh Plato, dilanjutkan Aristoteles dan Xenophone. Lalu perkembangan pemikiran ekonomi selanjutnya adalah kaum Skolastik. Berbeda dengan pemikir kaum Yunani Kuno, pemikiran kaum Skolastik ini ada analisis yang terperinci tentang usaha mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Ciri-ciri utama dari pemikiran ekonomi kaum Skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini tidak lain karena ajaran-ajaran kaum Skolastik mendapat pengaruh yang sangat kuat dari ajaran gereja. Tokoh utama ini adalah St. Albertus Magnus dan St. Thomas Aquinas.

Lalu selanjutnya, terdapatlah pemikiran kapitalisme/ liberalisme, yang dipelopori oleh Adam Smith, masa kapitalisme yang tumbuh subur sejak revolusi industri di Inggris ini terus berkembang sampai pada masa Hatta hidup (bahkan terus berkembang sampai saat ini). Dalam banyak hal pemikiran kapitalisme agaknya sejalan dengan pemikiran kaum fisiokrat. Seperti juga kaum fisiokrat, kapitalis juga mendukung asas *faire-laissez passer*, dimana asas ini menekankan tidak adanya intervensi dalam mekanisme pasar, sebab pada dasarnya, jika terdapat ketidakseimbangan, maka akan muncul “sebuah tangan yang tidak terlihat” (*invisible hand*).

Lalu setelah kapitalisme, maka muncullah sosialisme sebagai reaksi atas aliran kapitalisme. William L Reese dalam bukunya “*Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought*” mengemukakan bahwa sosialisme secara liberal berasal dari bahasa latin *socius*, yang merupakan suatu istilah yang mengatakan kepada suatu persekutuan

yang didirikan diatur prinsip-prinsip kebersamaan dalam kepemilikan baik soal produksi dan distribusi untuk kesejahteraan umum.³⁷

Sosislisme, telah dikemukakan, mula – mula muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat dibawah sistem kapitalisme liberal yang tamak. Kondisi buruk terutama dialami kaum pekerja atau buruh yang bekerja dipabrik-pabrik dan pusat-pusat sarana produksi dan transportasi. Sejumlah kaum cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan golongan dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran, mereka menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Diantara tokoh-tokoh awal penganjur sosialisme dapat disebut antara lain : St. Simon (1769-1873), Fourisse (1770-1837), Robert Owen (1771-1858), dan Louise Blane (1813-1882). Setelah itu baru muncul tokoh-tokoh seperti Proudhon, Marx, Engels, bakunin, dan lain sebagainya. St. Simon dipandang sebagai “bapak sosislisme” karena dialah orang pertama yang menyarankan perlunya saran-saran produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah/ negara. Gagasan merupakan benih awal lahirnya sistem kapitalis negara (*state capitalism*). Fourie, tokoh sosialis berikutnya, adalah orang pertama di Eropa yang merasa prihatin melihat pertarungan tersembunyi antara kaum kapitalis dan buruh. Dia mengusulkan kepada pemerintah Prancis agar membangun kompleks perumahan yang memisahkan kelompok-kelompok politik dan ekonomi, yang dapat menampung empat hingga lima ratus kepala keluarga. Ia menganjurkan hal ini untuk menghentikan pertarungan dan pertentangan ekonomi antara kaum kapitalis dan buruh. Pandangan ini tidak mendapatkan tanggapan positif, sedangkan ajaran St Simon banyak mendapat pengikut serta mendorong lahirnya marxisme di kemudian hari. Robert Owen,

³⁷ http://indonesiafile.com/index?option=com_content@task=viem&id=108&itemid=40

seorang ahli ekonomi yang berpandangan sama dengan Fourier. Tetapi pandangan kurang bulat dibanding pandangan pendahulunya. Ia mengajarkan pentingnya perbaikan ekonomi seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian masalah yang timbul antara kaum kapitalis dan buruh. Caranya melalui kebijakan yang dapat mengendalikan timbulnya kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Ia sendiri pernah menjadi manajer sebuah pabrik. Pengalamannya sebagai manajer sangat mempengaruhi pemikiran ekonominya. Sekalipun demikian ide-ide nya dianut banyak orang di Inggris.³⁸ Dan juga sebagai mana Fourier, Owen berfikir didalam rangka komunitas yang memilih sistem industri baru dimana desa industri dan pertanian dibangun atas dasar koperasi. Owen mencita-citakan para pekerja bersatu untuk mengorganisasi diri mereka.³⁹

Sosialisme menurut Karl Marx (1818-1883) bukanlah pendapat seorang pujangga yang ingin memperbaharui dunia, melainkan suatu keadaan yang tidak dapat ditindas sebagai akibat dari pertentangan dua kelas yang dilahirkan sejarah yaitu kelas borjuis dan kelas proletariat. Marx berpendapat demikian karena paham dialektika materialismenya, yang menganggap bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Perbedaan pandangan antara Prodhun dan Marx inilah yang membuat gerakan sosialis internasional mengalami perpecahan pada akhir abad ke-19, dan sosialisme pun pecah kedalam berbagai aliran seperti sosialisme demokrat, komunis ala Marx, sosialisme anarkis

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir*, (Jogjakarta: Penerbit Qalam, 1993), h. 175.

ala Bakunin, Marxisme-leninisme, sosialisme ala Kautsky, sosialisme Kristen, dan lain-lain.⁴⁰

Perbedaan yang sifatnya prinsipil inilah yang menyebabkan pertentangan yang tajam antara aliran sosialisme dan kapitalisme dan didalam pertentangan yang tajam inilah Hatta lahir, tumbuh dan besar. Sepertinya sudah merupakan jalannya apabila Hatta memilih sosialisme dalam *frame* pemikiran ekonominya. Hal itu tidak mengherankan, jika ia melihat kekejaman kapitalisme yang dilakukan oleh penjajah kolonial kepada rakyat Indonesia, seperti diberikannya pajak yang besar kepada rakyat, tidak tersedianya pendidikan dan kesehatan serta perlakuan masyarakat kolonial yang diskriminatif. Selain itu, perhatian Hatta yang begitu tinggi terhadap sosialisme bisa jadi karena sejak usia masih muda Hatta telah dipengaruhi oleh unsur-unsur sosialis, seperti kedekatannya dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam seperti H. Agus Salim dan Abdul Moeis. Tetapi walaupun Hatta adalah seorang sosialis, namun bukan berarti Hatta adalah seorang Marxisme. Pemikiran sosialis Hatta kerap kali mengelaborasi pemikiran ke Islamannya dengan pemikiran sosialis nya hal itu terlihat dalam bukunya “Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia”.

“Sekarang, bagaimana duduknya sosialisme Indonesia? Cita-cita sosialisme lahir dalam pangkuan pergerakan kebangsaan Indonesia. Dalam pergerakan yang menuju kebebasan dari penghinaan diri dan penjajahan, dengan sendirinya orang terpicat oleh tuntutan sosialisme dan harmonisme “perikemanusiaan” yang disebarkan oleh pergerakan sosialisme di benua Barat. Tuntutan sosial dan humanisme itu tertangkap pula oleh jiwa Islam, yang memang menghendaki pelaksanaan perintah Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta Adil, supaya manusia hidup dalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dengan tolong menolong.”⁴¹

⁴⁰ http://indonesiafile.com/index?option=com_content@task=view&id=108&Itemid=40

⁴¹ Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1967), h. 115.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (greek),¹ yaitu *oiknomeia*, kata *oiknomeia* berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti aturan.² Dengan demikian ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian populasi nya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh satu negara.³ Dari pengertian etimologis tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*.⁴

Adapun secara terminologis para ekonom banyak sekali memberikan definisi mengenai ekonomi, diantaranya oleh Adam Smith yang dikenal sebagai “Bapak Ekonomi Dunia” mendefinisikan ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil industri, pertanian dan lain-lain.⁵

¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 47.

² Murasa Sarkani Putra, *Pengertian Ekonomi Islam : Bahan Pengajaran Ekonomi Perbankan Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: 1999), h. 5.

³ Taqyuddin An-Nabhani, *Loc.cit.*

⁴ *Ibid*, h. 47.

⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Karim, *Sistem, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Terj), (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 10.

Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi dinamakan *mu'amalah maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi dinamakan *iqtishad*, yaitu mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Melihat berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi, dengan demikian bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.

Dengan semakin beragamnya definisi mengenai ekonomi secara umum yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi, maka ekonomi Islam pun didefinisikan secara beragam pula oleh para pakar ekonomi Islam, diantaranya Muhammad Abdul Mannan seorang pakar ekonomi Islam, menurutnya yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Adapun menurut Dr. Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, aktifitas ekonomi seperti produksi,

distribusi, konsumsi, import dan ekspor tidak lepas dari titik ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.⁶

Sedangkan Abdullah Al-Arabi berpendapat, ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas dasar-dasar sesuai dengan lingkungan dan masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya atau ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridho Allah. Dari defenisi ini terdapat tiga cakupan utama dalam ekonomi Islam, yaitu tata kehidupan, pemenuhan kebutuhan dan ridho Allah yang kesemuanya diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qura'an dan As-Sunnah, yang akhirnya menunjukkan konsistensi antara niat karena Allah, kaifat atau cara-cara dan ghayah dan tujuan dari setiap manusia.

Ini tidak berarti ekonomi Islam hanya diproyeksikan untuk orang-orang yang beragama Islam, karena Islam membolehkan umatnya untuk melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim sekalipun. Dengan kalimat lain, ekonomi Islam lebih mengedepankan urgensi sistem ekonominya hendak dibina dan dibangun daripada sekedar membangun dan membina para pelakunya yang harus beragama Islam. Hanya saja, tentu

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 31.

Islam menghendaki agar umat Islam itu sendiri justru menjadi pelopor dan pengawal dari sistem ekonomi Islam itu sendiri yang dimilikinya.⁷

Sebagai agama yang oleh Al-Qur'an dijuluki dengan agama terlengkap dan tersempurna (*dinul kamil wa-dinun itmam*), Islam memiliki dan mempersembahkan konsep-konsep pemikiran ekonomi yang filosofis, nilai-nilai etika ekonomi yang moralis, dan norma-norma hukum ekonomi yang tegas dan jelas. Diatas akar tunggang akidah Islamiah (kokoh), dan dibingkai dengan tiga pilar utama (konsep yang filosofis, nilai etika yang moralis dan hukum yang normatif aplikatif).⁸

Namun pada perkembangan selanjutnya, kira-kira sama dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam juga terdapat mazhab-mazhab didalamnya. Adiwarman Karim, salah seorang pakar ekonomi Islam Indonesia, dan penggagas The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, menuliskan bahwa ada 3 mazhab ekonomi Islam, sebagai berikut. *Pertama*, mazhab Baqir al-Shadr. Mazhab ini dipelopori oleh Baqir al-Shadr dengan bukunya "*iqtishaduna*", mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang lemah. Ilmu ekonomi (economics) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Oleh karena itu, al-Shadr menolak statemen bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan

⁷ M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kolam Publishing, 2008), h. 49.

⁸ *Ibid.*

manusia tersebut jumlah nya terbatas. Hal tersebut sangat tidak relevan karena firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Qamar (54:49) dinyatakan :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya : Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (QS. Al-Qamar (54:49)).⁹

Kedua, Mazhab Mainsream yang terdiri dari M. Umer Chapra, M. Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi dan para pemikir ekonomi Islam dunia lebih banyak tergolong pada kelompok ini. Berbagai pendapat dari mazhab mainstream tidak begitu berbeda dengan pendapat konvensional, hanya saja yang membedakan adalah cara penyelesaian permasalahan (*method of problem solving*). Berbeda dengan penentuan skala prioritas dalam ekonomi konvensional yang tergantung pada individu dengan atau tanpa pendekatan agama, tetapi dengan “mempertuhankan hawa nafsu dan materi”, sedangkan mazhab ini berpendapat dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan tidak dapat dillakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk ekonomi, harus merujuk pada ajaran Allah lewat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mazhab ini juga setuju dengan kemunculan masalah ekonomi karena keterbatasan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Namun, keterbatasan sumber daya tersebut, hanya terjadi pada berbagai tempat dan waktu saja, sebagai mana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2:155) :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit.* 98.

Artinya : Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Qs. Al-Baqarah (2:155)).¹⁰

Selain keterbatasan merupakan ujian dari Allah SWT, juga sifat manusia yang berkeinginan tidak terbatas dianggap sebagai sifat yang ilmiah.

Ketiga, mazhab alternatif-kritis dipelopori oleh Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di Universitas of Southern California). Kuran mengkritisi kedua mazhab diatas. Mazhab ini berpendapat bahwa yang perlu dikritisi tidak hanya kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga ekonomi Islam itu sendiri.¹¹

Dari sekian literatur dan perkembangan perekonomian Islam didunia, tampaknya mazhab mainstream lebih fleksibel dan dominan dalam berkiprah karena seperti yang ditulis oleh Muhammad Muslehuddin bahwa sesungguhnya esensi dari ekonomi Islam adalah perilaku dan sistem ekonomi yang dibangun (*established*) dan ditegakkan berdasarkan syariah, dan kemungkinan menerima unsur ekonomi lainnya selama tidak bertentangan dengannya. Oleh karena itu, mengenai pembahasan ekonomi Islam selanjutnya, yaitu nilai-nilai dasar ekonomi Islam, nilai-nilai instrumental ekonomi Islam dan tujuan ekonomi Islam, penulis menggunakan pendekatan yang lebih condong kepada mazhab *mainstream*.

B. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah :

1. Nilai Dasar Kepemilikan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.* 102.

¹¹ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 13-16.

Dalam pandangan ekonomi Islam apabila terdapat cabang-cabang produksi yang mengandung hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pribadi, maka negara berhak menyitanya. Hal tersebut bersandar pada suatu riwayat, yaitu Nabi pernah menyita sebidang tanah di kota Madinah “ *tanah al-naqi*” yang diperuntukkan bagi kaum muslimin untuk mengembalikan kuda-kuda mereka, artinya tanah tersebut dijadikan sebagai milik publik dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Prinsip tersebut juga dilestarikan oleh Khalifah Umar Bin Khattab yang berusaha untuk menyita/ menjaga aset yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat publik dalam penguasaan ruang publik tersebut, Umar pernah menyita tanah ar-Rabdzah dan diperuntukkan bagi tempat pengembalaan kaum muslimin.¹²

2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Atas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan (QS. Al-Furqan : 67, Ar-Rahman : 9). Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Disamping itu harus juga dipelihara keseimbangan hak dan kewajiban.¹³

3. Keadilan

¹² Ibid, h. 75.

¹³ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998), h. 7-8.

Nilai dasar sistem ekonomi Islam ketiga adalah keadilan. Kata adil adalah kata terbanyak disebut dalam Al-Qur'an (lebih dari seribu kali), setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti bahwa nilai kata itu sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa keadilan itu harus diterapkan dalam semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai dengan tekanan yang wajar dan kadar yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam Islam sistem ijon sangat dilarang dan tidak hanya ijon Islam juga melarang untuk menjual barang-barang yang palsu dan menganjurkan penggunaan ukuran dan timbangan yang benar, hal itu bisa dilihat :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Qs. Al-Baqarah. 188).¹⁴

Keadilan dalam ekonomi juga berlaku dalam penetapan upah pekerja. Dalam ekonomi Islam, upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh harus sesuai dan layak. Islam tidak menghendaki adanya eksploitasi buruh yang diterapkan oleh masyarakat kapitalis dan dalam ekonomi Islam, upah buruh ditetapkan secara adil dan seimbang.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h.14.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

Yang mana upah yang seimbang itu disesuaikan dengan posisi kerja dari buruh tersebut.

Seperti yang diterangkan oleh Allah:

النَّاسُ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Qs. Annisa' : 58).¹⁵

Selain itu, keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, sedekah. Watak utama nilai keadaan yang dikemukakan diatas adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakuran. Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi masyarakat yang bersangkutan.

Ketiga nilai dasar sistem ekonomi Islam tersebut diatas yaitu kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber produksi, keseimbangan dan keadilan merupakan pangkal nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam.¹⁶

C. Nilai Instrumental Ekonomi Islam

Tiap sistem ekonomi, menurut aliran pemikiran dan agama tertentu, memiliki perangkat nilai instrumental sendiri yang berlainan. Dalam sistem kapitalisme nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, informasi dan bentuk pasar atomistik dari setiap unit ekonomi, pasar yang monopolistik untuk mencegah perang harga dan pada waktu yang sama menjamin produsen

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h. 302.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Op.cit.* h. 8-9.

dengan kemampuan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari pada biaya marginal. Sedangkan dalam sistem marxisme, semua perencanaan ekonomi dilaksanakan secara sentral melalui proses yang mekanistik, pemilikan kaum proletar terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif, proses iterasi dan kolektivisme ini adalah beberapa nilai instrumental yang pokok dari sistem marxisme.¹⁷

Dalam sistem ekonomi Islam dapat kita tangkap, lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, sebagai berikut :

1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan dan aturan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Perkataan zakat disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam yang kedua.¹⁸

Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan berpengaruh nyata dalam tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam beberapa hal, mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Pengaruh-pengaruh dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan

¹⁷ Ahmad M. Saefuddin, *studi nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Media Dakwah, 1984), h. 42.

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Op.cit*, h. 10.

pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2. Pelarangan Riba

Secara etimologi, riba berarti kelebihan atau tambahan. Semua arti riba secara etimologis ini digunakan Allah diantaranya dalam Al-Qur'an, surat Fussulat : 39 yang berbunyi :

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

Artinya :...Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur.(Qs. Fuslihat : 39).¹⁹

Dan Surat An-Nahl : 92 yang berbunyi

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

Artinya :...Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.(Qs. An Nahl : 92).²⁰

Adapun para ulama fiqih mendefenisikan riba dengan “ kelebihan harta dengan suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/ gantinya”. Pelarangan riba dalam Islam pada hakikatnya berarti penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h. 321

²⁰ *Ibid.*h. 143.

sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik bunga tinggi maupun pendek, adalah termasuk riba. Sesungguhnya Islam itu adalah suatu sistem ekonomi yang bersendikan larangan riba.

Ulama-ulama telah sepakat tentang larangan riba menurut Al-Qur'an, yaitu raiba nasiah, riba yang tambahan padanya merupakan imbalan dari masa yang tertentu, panjang atau pendek, sedikit atau banyak. Dan riba Al-Qur'an, termasuk riba yang dijalankan oleh bank atau lembaga keuangan non bank dan orang-orang dalam transaksi perdagangan mereka yang non Islami, semuanya haram tanpa keraguan.

3. Kerjasama Ekonomi

Dalam ekonomi Islam dikatakan bahwa antara satu manusia dengan manusia yang lain adalah sebuah saudara dan oleh karena itu sesama saudara, Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dan gotong royong. Hal itu terlihat dari firman Allah :

Artinya :...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (Qs. Al Maidah : ٤٧).

Qirad atau syirkah dalam Islam jelas berbeda dengan sistem ekonomi non Islami yang individualistis , yang mengajarkan konflik antara pesaing dan memenangkan yang terkuat, sehingga melahirkan usaha untuk menumpuk kekayaan dan kekuatan,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّا فِي الْكِتَابِ وَلَقَدْ رَفَعْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَكَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَلَدُنَّيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ بِنَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (Qs. Al An'am : ١٥١)

ketidakadilan sosial ekonomi, pertentangan antar kelas dan akhirnya kejatuhan bangsa dan kebudayaan.

Artinya :Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Qs. Zukhruf : 32).²²

Impilikasi dari nilai kerjasama dalam ekonomi Islam ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan umat.

4. Jaminan Sosial

Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ajaran antara lain untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah :

1) manfaat sumber-sumber alam harus dapat didikmati oleh semua makhluk Allah (QS Al-An'am : 38 dan QS Ar-Rahman : 10) (2) kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya boleh berputar diantara orang kaya saja (QS Al-Humazah : 2) (3) berbuat baiklah

²² *Ibid*, h. 341.

kepada masyarakat, sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu (QS Al-Qashas : 77). Antara lain dengan menyediakan sumber-sumber alam itu, (4) seorang muslim yang tidak mempunyai kekayaan, harus mau dan mampu menyumbangkan tenaganya untuk tujuan-tujuan sosial (QS At-Taubah : 79) (5) seseorang janganlah menyumbang untuk kepentingan sosial dan juga untuk keperluan pribadi serta keluarga sebagai unit kecil masyarakat, agar dipuji orang lain (QS At-Taubah : 262) (6) jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan tersebut (QS Al-baqarah : 273, At- Taubah : 60).

Maksud jaminan sosial ialah bahwa negara menjamin bagi setiap individu dalam negara tersebut taraf hidup yang layak, dalam hal itu sekiranya ada orang fakir, sakit atau lanjut usia yang tidak lagi dapat mencapai taraf hidup ini, maka negara melalui zakat tetap menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi mereka. Dalam hal ini elemen jaminan sosial tidak hanya terbatas pada dana zakat saja, melainkan sumber pendapatan negara lain seperti pajak, dan retribusi dapat dialokasikan bagi pemenuhan kebutuhan dan jaminan sosial negara.

Disamping pemberian masalah sandang, pangan dan papan tersebut, dalam ekonomi Islam juga memberikan perhatian serta jaminan sosial pada bidang pendidikan dan kesekahatan. Hal itu dicontohkan oeh Rasulallah yang semasa hidupnya memberi perhatian besar terhadap pengajaran dan pendidikan bagi setiap muslim dan menanamkan setiap sumber daya untuk membuat mereka melek huruf. Sebagai contoh, Rasulallah memerintahkan Zaid bin Tsabit yang telah diaarkan membaca dan menulis oleh seorang tawanan perang Badar, untuk mempelajari tulisan yahudi. Rasulallah juga menyatakan kepada sepuluh orang pemuda Anshar mambaca dan menulis, mereka akan dibebaskan.

Dengan cara ini, jumlah sahabat yang melek huruf meningkat sehingga juru tulis dan baca Rasulullah Saw tercatat sebanyak 42 orang. Angka ini sangat berarti dibandingkan dengan sebelum masa kenabian, jumlah suku Quraisy yang melek huruf hanya 17. Demikian juga di Madinah, kecuali bangsa Yahudi, jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis sangat sedikit. Al-Waqidi mengatakan jumlah itu hanya sebelas orang. Gerakan belajar membaca dan menulis di Madinah dan menyebar luas sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama *Darul Qurra* (rumah para penulis).

Mengenai masalah pendidikan dan pengajaran ini, Dr. Yusuf Qardhawi, pemikir ekonomi Islam masa kontemporer, menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam wajib mengembangkan sistem pengajaran dan pelatihan yang mana sistem tersebut ditujukan untuk mempersiapkan kemampuan dan potensi manusia pada berbagai bidang yang dibutuhkan. Hendaknya dikembangkan pula sistem manajemen dan keuangan agar berbagai sumber daya manusia ini dapat dikembangkan pula sistem manajemen dan keuangan berbagai sumber daya manusia ini dapat dikembangkan, dialokasikan dan didistribusikan untuk berbagai spesialisasi secara seimbang dan tepat, sebagai mana petunjuk yang diberikan dalam Al-Qur'an :

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ

مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Qs. At Taubah : 122).²³

Tidak hanya pendidikan dan pengajaran, jaminan sosial dalam ekonomi Islam juga harus meliputi masalah kesehatan. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah yang memberi perhatian sangat besar pada masalah kesehatan. Salah satu hadist Rasulullah yang paling terkenal adalah : “*kebersihan sebagian dari iman*” membuktikan hal itu. Ini selaras dengan hadist lain yang mengatakan “*seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akuwajibkan mereka menggosok gigi setiap kali sholat* “. Disamping itu, untuk mencegah penyebaran penyakit, Rasulullah memerintahkan agar orang yang sakit dikarantina sampai sembuh.

5. Peranan Negara Dalam Sistem Ekonomi

Nilai instrumental yang kelima ini ialah peran atau campur tangan pemerintah dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam, negara dapat sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor dan sekaligus lembaga pengawasan kehidupan ekonomi melalui lembaga hisbah. Hisbah adalah institusi pemerintah yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad Saw, sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang menjamin tidak adanya perkosaan dan pelanggaran aturan moral dalam pasar, monopoli, perkosaan terhadap hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. Hisbah ini indenpenden dari kekuasaan yudisial maupun eksekutif dari pemerintah.²⁴

Peranan negara dalam perekonomian sangat variatif dan bermacam-macam salah satunya adalah mencegah *ihtikar* (penimbunan). Rasulullah sendiri, semasa hidupnya

²³ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h. 289.

²⁴ Ahmad M. Saefuddin, *Op.cit.* h. 289.

sangat melarang dan mengecam *ihtikar* ini. Pelarangan *ihtikar* inipun dilanjutkan oleh penerus Rasulullah. Imam Malik meriwayatkan bahwa khalifah Umar memerintahkan kepada rakyatnya agar tidak seorangpun yang boleh menyembunyikan keadaan barang dagangan dalam pemasarannya. Menurut riwayat Ibn Majah, Umar pernah berkata, “orang yang membawa hasil panen ke dalam kota kita akan melimpahkan kekayaan yang banyak dan orang yang menyembunyikan akan dikutuk, jika ada seseorang yang menyembunyikan hasil panen (barang-barang kebutuhan lainnya) sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya (barang-barang keperluan lainnya) dengan paksa”. Sayyidina Usman, sebagai khalifah ketiga pun melarang penyembunyian barang-barang semasa masa kekhalifahannya.²⁵

Yahya Bin Umar, seorang cendekiawan muslim, menyatakan bahwa timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat merupakan alasan dari pelarangan penimbunan barang tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini harus disedekahkan sebagai pendidikan terhadap pelaku *ihtikar*. Adapun para pelaku *ihtikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku *ihtikar* agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memperdulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, lari mengelilingi kota, dan memenjarakannya.²⁶

Peranan negara pada umumnya, pemerintah pada khususnya sangat menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Peranan itu diperlukan dalam aspek

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta, : Dana Bakti Wakaf, 1995),h. 82.

²⁶ Ahmad M. Saefuddin, *Op.cit.*, h. 289

hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan dan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.


D. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan dari sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangannya tentang dunia, yang menyangkut tentang makna dari tujuan hidup manusia, prinsip kepemilikan dan tujuan manusia memiliki sumber daya yang ada dikaitkan kepada hubungannya antara manusia dan manusia lain dengan lingkungannya. Dalam hal ini setiap agama mempunyai pandangan yang berbeda jika dunia dianggap dan dengan sendirinya, maka konsekuensinya logis yang akan timbul adalah manusia harus bertanggung jawab segala perbuatannya. Tujuan hidupnya tak lebih hanya untuk memaksimalkan kepuasan pribadi masing-masing. Berbeda ketika manusia beranggapan bahwa ia hanya sekedar bidak diatas papan catur, semua peristiwa berjalan sesuai dengan “skenario langit” sehingga manusia tidak perlu mengusik segala macam ketidakadilan yang terjadi didunia.

Berbeda dari keduanya, Islam menganggap bahwa manusia dan segala apa yang ia miliki adalah ciptaan Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kepadaNya, dan Islam juga mempunyai komitmen terhadap persaudaraan dan keadilan sehingga kesejahteraan (*falah*) bagi umat manusia merupakan tujuan (*maqashid*) pokok Islam. Maqashid Al-Syari'ah oleh Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dibagi dalam lima unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*) keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*), kesejahteraan dapat diraih dengan pemenuhan kebutuhan materi dengan kebutuhan rihani di personalitas individu.

Bertolak dari tujuan pokok Islam, maka tujuan ekonomi Islam secara umum adalah pemenuhan kebutuhan yang berasaskan kebahagiaan dunia dan akhirat secara selaras dan seimbang baik secara pribadi maupun secara keseluruhan masyarakat dengan tujuan pokok mencari keuntungan dunia dan akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Tujuan ekonomi Islam bersandar kepada firman Allah dalam surat Al-Qashas ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

Artinya :Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan  (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Qs.Al Qashas : 77).²⁷

²⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 457

BAB IV

PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DAN TINJAUANNYA DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta

1. Demokrasi Ekonomi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *krotos/ kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Mengenai masalah demokrasi ini, Hatta sendiri juga sering mengistilahkan demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan rakyat ini sendiri diciptakan oleh Hatta. Sebelum Hatta mencetuskannya, belum dikenal istilah kedaulatan rakyat, yang dalam bahasa Belanda disebut *Volkssouvereiniteit*.¹ Penggunaan istilah kedaulatan rakyat oleh Hatta ini, bisa kita lihat dalam tulisannya :

“ pada waktu yang akhir ini sering kali orang mengartikan “kedaulatan rakyat”, sebab itu ada baiknya kalau saya disini berkata sepatah kata tentang kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dengan cara mufakat. Kata mufakat mestilah ada, barulah kedaulatan itu ada pada rakyat. Putusan yang diambil oleh seseorang atau satu golongan saja dengan tidak ada persetujuan rakyat, bukanlah kedaulatan rakyat. Demikian juga kata mufakat yang dipaksakan kepada rakyat”.²

Kedaulatan rakyat atau istilah demokrasi yang dipahami Hatta bukanlah demokrasi yang dipraktekkan negara-negara Barat. Hatta menganalisis bahwa revolusi Perancis tahun 1789, yang terkenal sebagai sumber demokrasi Barat menyatakan bahwa

¹ I. Wangsa Wijaya, *Men* 60
hal. 36.

ing Hatta, Cetakan Ke-II, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2002),

² Muhammad Hatta, *Kum*
o I, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2002), hal. 63-64.

trilogy *la Liberte, l' Egalite et la Fraternite* (kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan) yang menjadi semboyannya tidak terlaksana didalam praktik. Karena menurutnya revolusi Perancis meletus sebagai revolusi individual untuk memerdekakan orang-orang dari ikatan feodalisme, yang mana kemerdekaan individu yang diutamakan. Dalam merealisasikannya orang lupa akan rangkaiannya dengan persamaan dan persaudaraan.

Namun walaupun Hatta menolak demokrasi versi Barat, bukan berarti Hatta menerima “demokrasi rakyat” versi negara komunis, Uni Soviet. Karena menurutnya demokrasi rakyat versi komunis bukanlah sebuah demokrasi. Menurut Hatta, demokrasi membawa penghargaan kepada manusia dan persamaan antara mereka, hal inilah yang tidak ada dalam sistem komunis. Sistem pemerintahan komunisme itu pada dasarnya tidak lain daripada feodalisme yang dirasionalisasi.³

Lalu dalam tulisannya di Daulat Ra'jat pada tahun 1932, Hatta juga menambahkan penilaiannya mengenai demokrasi Barat, bahwa demokrasi yang dilahirkan oleh revolusi Perancis tidak memberi kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat, dimana rakyat raja dalam menentukan nasibnya sendiri. Untuk mencapai kedaulatan rakyat, dibutuhkan juga demokrasi yang lain, yaitu demokrasi ekonomi, yang memakai dasar “segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak pula.”⁴ Pemikiran Hatta mengenai demokrasi ekonomi inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan

³ Muhammad Hatta. *Op.cit.*, h. 180.

⁴ Muhammad Hatta, *Op.cit.*, h. 111.

adanya demokrasi ekonomi barulah bisa terjamin adanya keadilan sosial yang menghendaki kemakmuran yang merata keseluruh rakyat.⁵

Keadilan sosial yang menjadi tujuan dari penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia, menurut Hatta, diinspirasi oleh tiga hal yaitu *pertama*, paham sosialisme Barat yang dibawa oleh Karl Marx, yang menarik perhatian Barat karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya. Sosialisme yang menurut cita-citanya, adalah suatu bangun masyarakat yang tidak berkelas, dimana berlaku sama rata dan sama rasa, bebas dari segala macam pertentangan, produksi dilakukan sebagai usaha bersama, oleh orang banyak dan untuk orang banyak, dibawah pimpinan badan-badan masyarakat.⁶

Kedua, ajaran Islam yang didalamnya terdapat kebenaran dan keadilan Ilahi yang menurut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat dan persaudaraan manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang maha Pengasih dan Penyayang. Tuntutan sosial dan humanisme dari ajaran sosialis itu tertangkap pula oleh jiwa Islam. Menurut ajaran Islam, bumi dan langit, pendek kata, alam seluruhnya adalah kepunyaan Allah.⁷

Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Semangat kolektivisme tersebut, terlihat dalam kepemilikan tanah di dalam masyarakat desa yang asli Indonesia. Dalam masyarakat desa yang asli di Indonesia tanah bukanlah milik orang-seorang, melainkan kepunyaan desa. Orang-seorang hanya mempunyai hak pakai. Orang-seorang dapat mempergunakan tanah yang masih kosong sebanyak yang

⁵ Mohammad Hatta, *Op.cit*, h. 160.

⁶ *Ibid.*h. 96.

⁷ *Ibid.*, h. 102.

dapat dikerjakannya untuk keperluan hidup sekeluarga, dan ia tidak boleh menjualnya. Pada saat itu kelihatanlah keadaan yang sebenarnya, yang tak tampak sepintas lalu, bahwa tanah adalah kepunyaan masyarakat, bukan kepunyaan orang-seorang.⁸

Menurut Analisis penulis, Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, tampak jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang bersifat makro maupun mikro. Dan dalam demokrasi ekonomi ini juga menjadi landasan dari pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional. Dalam pandangan Hatta, pembangunan ekonomi nasional terdapat dua cara yang sangat utama dan fundamental sifatnya, yaitu :

Pertama, pembangunan yang kecil-kecilan dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur, dari kecil, sedang menjadi besar, dari pertukangan atau kearajinan menjadi industri.⁹

Kedua, pembangunan yang besar-besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum yang tertentu dibawah penguasaan atau pengawasan pemerintah. Pedoman bagi segala usaha tersebut ialah mencapai “ sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹⁰ Dan segala kegiatan politik yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Dua pembangunan secara nasional ini, terlihat bagaimana demokrasi ekonomi, dimana rakyat memegang peranan penting dalam masalah perekonomian. Namun, walaupun Hatta hanya mengemukakan secara gamblang dua cara tersebut mengenai

⁸ *Ibid.* h. 18.

⁹ Mohammad Hatta, *Ekonomi Industri*, (Jakarta. Pustaka Gunung Agung, 1987). h. 31.

¹⁰ *Ibid.* h. 40.

pembangunan ekonomi nasional, bukan berarti manepikan pembangunan ekonomi nasional lain yang dirintis oleh perseorangan. Dalam pemikirannya mengenai hal ini, Hatta juga mempersilahkan usaha-usaha pribadi seperti Firma, PT dan CV untuk turut serta dalam mengisi pembangunan nasional.¹¹ Pengakuan Hatta terhadap usaha pribadi ini menunjukkan Hatta tidak hanya mementingkan kolektivisme tetapi juga menunjukkan pengakuan Hatta terhadap usaha-usaha dan kepemilikan pribadi.

Selanjutnya pemikiran pembangunan yang sifatnya mikro melalui jalan koperasi dan sifatnya makro melalui politik pemerintah yang berdasarkan kerakyatan akan dijelaskan di poin-poin selanjutnya

2. Ekonomi Kerakyatan Menurut Mohammad Hatta

Mohammad Hatta sebagai salah seorang pendiri Republik Indonesia menulis “*Ekonomi Rakyat Dalam bahaya*”. Tulisan ini telah menjadi dasar konsep ekonomi kerakyatan sebagai tandingan untuk mengenyahkan sistem ekonomi kolonial belanda yang didukung oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme didalam negeri dan pihak-pihak swasta asing tertentu sebagai komprador pihak kolonial Belanda. Usaha untuk mengenyahkan sistem kolonial ini adalah landasan utama perjuangan Republik Indonesia.

Observasi Hatta secara jelas menghendaki suatu reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat dapat berperan atau punya posisi tawar yang kukuh dalam hubungannya dengan para pelaku sektor ekonomi modern dengan konco-konconya yang secara langsung melakukan proses eksploitasi. Reformasi sosial ini mengandung pengertian

¹¹ *Ibid.* h. 54.

koreksi terhadap dialektik hubungan ekonomi secara fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi didalam masyarakat.

Sampai sekarang, Indonesia tidak melakukan suatu reformasi sosial sehingga dialektik hubungan ekonomi lemah tetap seperti yang telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda.

Organisasi koperasi dapat berperan dalam reformasi sosial dengan menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam dua aspek. *Pertama*, secara kolektif menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan langsung kekonsumen dengan posisi tawar yang kukuh. *Kedua*, organisasi koperasi dapat menjadi wadah yang bertanggung jawab dalam membeli barang-barang yang diperlukan oleh pelaku ekonomi rakyat langsung dari para pemasok disektor modern dengan posisi tawar yang kukuh pula. Melalui koperasi organisasi koperasi seluruh para pelaku penindas dan parasit ekonomi disapu bersih.

Koperasi berasal dari kata-kata “ko”, yang artinya bersama dan “operasi” yaitu bekerja. Jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tidak ada sebagian anggota bekerja memeluk tangan, semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

Gagasan koperasi yang dicetuskan Hatta sebagai bentuk organisasi ekonomi rakyat Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan koperasi di Denmark yang dikaitkannya dengan kehidupan demokrasi politik di negara itu. Hatta tampak mempunyai pandangan yang sama dengan Ravnholt bahwa dasar-dasar demokrasi

ekonomi yang dijalankan dalam perkumpulan koperasi akan menjadi landasan utama bagi kehidupan demokrasi politik. Dalam pidato radionya untuk menyambut hari koperasi yang ketiga pada tanggal 11 Juli 1953, Hatta mengutip pernyataan Ravnholt yang dikemukakan dalam bukunya *The Danish Cooperative Movement* :¹²

“Dalam perkumpulan koperasi, dasar-dasar ekonomi telah terlebih dahulu dijalankan sebelum rakyat Denemarken seluruhnya mengenal demokrasi politik”.¹³

Hatta sebagai seorang demokrat tampaknya sangat terpengaruh dengan adanya kaitan dengan perkembangan koperasi dengan demokrasi politik di Denmark oleh karena koperasi memupuk rasa tanggung jawab rakyat. Hatta beranggapan bahwa tanpa rasa tanggung jawab pada rakyat tak mungkin ada demokrasi. Demokrasi mungkin ada, tetapi hanya namanya saja sedangkan isinya adalah anarki yang memperlihatkan keinginan yang bersimpangan yang didasarkan atas kepentingan sendiri atau golongan. Menurut Hatta, koperasi dan demokrasi bersifat saling menunjang. Koperasi mempertebal rasa tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan demokrasi yang berakar baik bagi kehidupan koperasi.¹⁴

Hatta menjelaskan bahwa dalam koperasi terdapat asas kolektivisme. Kedudukan anggota yang satu dengan yang lain sejajar dan sama rata oleh karena itu dalam koperasi tak ada majikan dan buruh, semuanya adalah pekerja yang sama-sama bekerja untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Dalam memberikan penjelasan mengenai asas kolektivisme dalam koperasi, Hatta juga menganalogikan koperasi sebagai sebuah

¹² Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia : Mengenang Bung Hatta, Bapak EKonomi Kerakyatan Indonesia*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2002), h. 104.

¹³ *Ibid.* h. 106.

¹⁴ *Ibid.* h. 107.

persekutuan keluarga, yang mana antara anggota yang satu dengan anggota lain mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memajukan koperasi tersebut. Sebagaimana keselamatan keluarga banyak bergantung kepada kesadaran dan cita-cita keluruhan budi dari anggota koperasi seluruhnya. Koperasi hanya bisa maju dengan cita-cita yang hidup dalam jiwa anggotanya, cita-cita yang berdasar keyakinan bahwa masyarakat Indonesia harus dibangun selekas-lekasnya dengan usaha gotong royong.

Berdasarkan asas kolektivisme inilah, dalam koperasi para pengurusnya tidak mendapatkan gaji. Hanya pejabat dan pekerja penuh sehari-hari saja yang memperoleh gaji. Ia (para pengurus koperasi) hanya memperoleh ongkos transportasi atau uang sidang yang diberikan ketika ia menghadiri sidang. Sementara waktu sidang itu mungkin hanya dilakukan sekali dalam seminggu-dua minggu, atau diadakan apabila terdapat masalah-masalah luar biasa yang harus dipecahkan.¹⁵ Dengan dasar kolektivisme tersebut, Hatta berpendapat bahwa koperasi adalah suatu bentuk yang ideal untuk menggerakkan ekonomi rakyat.¹⁶

Menurut Hatta, pembangunan koperasi tidak pernah dimulai dari seorang Professor, seorang Dokter, seorang Hartawan dan orang-orang pandai lainnya yang sudah mempunyai dasar hidup yang bahagia bagi diri dan keluarganya. Menurut Hatta pembangunan koperasi dimulai dari kaum buruh miskin, tani miskin dan para tukang yang miskin. Mereka terpesona oleh cita-cita koperasi yang dilukiskan oleh orang-orang yang pandai, yang akan membawa kemakmuran bagi mereka, tetapi mereka sadar, bahwa pembangunan koperasi itu tidak akan dapat dinanti-nantikan sebagai hasil orang-orang

¹⁵ Mohammad Hatta, *Op.cit.*, h. 79.

¹⁶ *Ibid*, h. 110.

hartawan dan dermawan. Mereka bulatkan tekad untuk memulainya sendiri, mengumpulkan uang pokok sedikit demi sedikit,¹⁷ dengan uang terkumpul tersebut, maka koperasi dapat membeli sekali banyak barang dagang. Karena membeli secara banyak, koperasi memperoleh potongan harga dan potongan itu menjadi keuntungan bagi anggota dan segala orang yang berbelanja pada koperasi itu. Pada toko-toko lain, keuntungan jatuh kepada ketangan empunya. Si pembeli tidak mendapat apa-apa. Pada koperasi yang menjual menurut harga pasar, segala keuntungan habis tahun dibagikan kepada anggota dan orang lain yang membeli pada toko koperasi itu, menurut besarnya jumlah pembelian masing-masing.¹⁸

Lalu Hatta juga menyatakan bahwa koperasi terdiri dari dua sendi, sendi solidaritas Dan sendi individualitas. Kerjasama adalah dasar dari sebuah koperasi, karena itu rasa solidaritas harus ada padanya. Selain rasa solidaritas, koperasi juga menghendaki inividualitas, yaitu kesadaran harga diri sendiri pada anggotanya. Karena hanya anggota yang sadar akan harga dirinya akan bertindak dengan memberi harapan, untuk mencapai dan membela kepentingan bersama. Sadar akan harga diri sendiri menimbulkan kepercayaan atan kemampuan diri sendiri untuk bertindak, dengan memberi harapan, untuk mencapai dan membela kepentingan bersama. Sadar akan harga diri sendiri menimbulkan kepercayaan atas kemampuan diri sendiri untuk bertindak. Dan kepercayaan penting adanya untuk menghapuskan rasa rendah diri, yang ditanam dalam jiwa rakyat Indonesia oleh penjajahan yang berabad-abad lamanya. Hanya dalam koperasi solidaritas dan individualitas dapat berkembang dalam hubungan yang

¹⁷ *Ibid.* 113.

¹⁸ *Ibid.*

harmonis, dengan menghidupkan dan memupuk solidaritas dan individualitas, koperasi mendidik dalam dada manusia rasa tanggung jawab sosial.¹⁹

Adapun Dasar-dasar moral yang juga harus termuat dalam koperasi, yaitu :

1. Tidak boleh dijual dan dikedaiakan barang yang palsu
2. Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin
3. Harga barang mesti sama dengan harga pasar setempat
4. Jual beli dengan kontan.²⁰

Menurut analisis penulis, bahwa dalam koperasi terdapat suatu tujuan yang utama yaitu menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya dengan jalan kerjasama. Dalam menguraikan tujuan koperasi, Hatta menganalogikan bahwa antara satu individu dengan individu yang lain seperti sebuah sapu lidi, yang mana kalau lidi itu berjalan sendiri-sendiri menjadi lemah dan mudah patah. Tetapi apabila diikat menjadi sapu, ia merupakan satu kesatuan yang kuat dan tidak mudah dipatahkan. Oleh karena itu tidak seperti sebuah badan usaha pada umumnya, koperasi tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan layaknya firma dan perseroan. Walaupun pada akhirnya koperasi memperoleh keuntungan, namun keuntungan itu bukanlah suatu tujuan. Wujud koperasi, seperti disebutkan tadi, ialah membela keperluan orang kecil.

¹⁹ *Ibid.* h. 132

²⁰ *Ibid.* 153

Mencapai keperluan hidup dengan ongkos semurah-murahnya, itulah tujuannya bukan keuntungan.

3. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dan Politik Ekonomi Kerakyatan

a. Menaikkan Daya Beli dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Rakyat

Tujuan politik perekonomian dalam pandangan Hatta ialah menaikkan tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur. Karena menurut Hatta rakyat tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan hidup, apabila tenaga beli riil-nya tidak bertambah dan perkembangan ekonomi suatu negara akan tetap bertahan, kalau rakyat didalamnya tetap miskin, oleh karena itu rencana pembangunan harus didasarkan atas kenaikan tenaga beli yang meningkat.²¹

Dalam meningkatkan tenaga beli masyarakat, Hatta mengungkapkan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi. Hatta pun menyadari bahwa untuk meningkatkan tenaga yang produktif bukanlah perkara yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Oleh karenanya, hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila ia dikerjakan menurut plan yang teratur dan konsekuen dalam mengerjakannya.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan kemakmuran, Hatta berpendapat harus menyelenggarakan terlebih dahulu kepentingan rakyat yang terpenting. Yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Menurutnya kepentingan yang lima ini merupakan suatu hal yang penting dan esensial bagi kehidupan manusia

²¹ Mohammad Hatta, *Loc.cit.*

dan bangsa yang beradab, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Hatta menghendaki asas *self-supporting* atau “menolong diri sendiri”, walaupun ia menyadari bahwa proses menuju hal tersebut memerlukan waktu yang lama dan cukup panjang dan tentu pada awalnya juga memerlukan bantuan luar negeri.²²

Lalu politik ekonomi baik itu yang sifatnya jangka pendek ataupun jangka panjang mengenai perumahan rakyat harus diadakan diseluruh Indonesia. Hatta juga menyadari dalam usaha memperbaharui tempat kediaman bagi seluruh rakyat adalah usaha yang sangat berat dan tidak sedikit ongkosnya serta juga memakan tempo yang lama, untuk modal awalnya Hatta menganjurkan negara mendirikan di tiap-tiap keresidenan suatu bak industri rumah, yang mana bank ini memberi uang muka, yang dapat diangsur sedikit demi sedikit oleh rakyat yang tertolong dengan rumah baru tersebut.²³

Selain itu yang terakhir dalam memenuhi kebutuhan dasar ialah memajukan pendidikan secepat mungkin. Bukan saja memperbanyak sekolah untuk menambah kecerdasan rakyat, akan tetapi juga mementingkan didikan koperasi yang menjadikan tiang perekonomian Indonesia di masa datang. Hatta juga memandang pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena untuk membangun (negara ini) perlu dididik lebih dahulu tenaga-tenaga ahli baik secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁴

b. Pembangunan Infrastruktur

²² *Ibid.* 211.

²³ Mohammad Hatta, *Op.cit.*, h. 147.

²⁴ *Ibid.*

Dalam memandang politik perekonomian, Hatta menaruh perhatian yang sangat besar kepada masalah distribusi. Distribusi adalah sambungan daripada produksi untuk menyampaikan yang dihasilkan kepada si pemakai atau konsumen, oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang bersifat infrastrukturnal seperti jalan raya, pelabuhan dan lain-lainnya dalam pandangan Hatta adalah pembangunan yang sifatnya tidak bisa dielakkan, dan perlu dilaksanakan dengan teratur oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena jalan perhubungan tersebut, menurut pendapat Hatta adalah sebuah urat nadi perekonomian.

Pembangunan ini yang menghendaki pembaharuan alat-alat yang begitu banyak, yang ongkosnya tidak sedikit, mungkin juga tidak dapat dibiayai dengan modal dari negara, dan mungkin juga harus dilaksanakan dengan modal pinjaman luar negeri yang berjangka panjang, berpuluh tahun lamanya. Namun dengan administrasi dan organisasi yang baik dan efisien, Hatta meyakini tujuan tersebut dapat dicapai.

c. Politik Industrialisasi dan Transmigrasi

Hatta berpendapat bahwa dengan industri saja tidak akan cukup mencapai kemakmuran rakyat. Industri mestinya bertempat di daerah yang ramai. Akan tetapi kalau penduduknya terlalu banyak seperti pulau Jawa, pangsa pasar untuk menjual barangnya semakin berkurang. Oleh karena itu, Hatta mengatakan politik perekonomian yang positif dalam menuju kemakmuran rakyat ialah mengadakan secara besar-besaran transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau seberang, yang disertai pula dengan politik industrialisasi. Begitu pula

sebaliknya, transmigrasi saja yang tidak disertai dengan industri tidak akan melepaskan kesusahan rakyat, melainkan hanya menundanya saja.

Dalam proses pemindahan tersebut, secara rinci, Mohammad Hatta menjelaskan pelaksanaan transmigrasi menyangkut dua hal : Pertama, rakyat dipindahkan itu ditempatkan di tempat yang telah terbuka, tetapi dilengkapi dengan persediaan hidup baru. Mereka tidak bakal mengadakan pertanian, tetapi akan dipekerjakan dalam industri, transport dan lain-lain. Kedua, Transmigrasi itu harus diadakan dengan membuka hutan dan membuat jalan transportasi dan membasmi sarang penyakit. Untuk pekerjaan tersebut saja sudah harus memerlukan beribu-ribu tenaga kerja untuk mengedakannya. Usaha tersebut tidak saja memberikan pekerjaan dan memerangi pengangguran. Namun, disamping usaha membuka hutan itu, dapat juga diadakan secara serentak berbagai usaha lain. yaitu kayu yang ditebang tersebut dapat dijadikan barang yang sifatnya ekonomis.

Kemudian, apabila persebaran penduduk sudah lebih baik, maka penghidupan di tanah jawa pun akan bertambah baik, dan tenaga pembeli rak: di pulau tersebut akan bertambah besar. Disamping itu, di tanah seberang di tempat-tempat yang dibuka itu, munculnya tenaga-tenaga pembeli baru. Dengan bertambahnya tenaga pembeli rakyat, dapatlah didirikan berbagai industri, yang pada gilirannya nanti memperbesar pula tenaga pembeli yang ada.

d. Pembangunan Bank untuk Membangun Roda Perekonomian

Organisasi dan kedudukan bank pada satu negeri adalah cermin dari pada keadaan dan kemajuan ekonominya. Pembangunan nasional yang dipaparkan Hatta

seperti, pengentasan kemiskinan, membangun perumahan, pelaksanaan transmigrasi dan politik industrialisasi, mau tidak mau memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam pandangan Hatta, bank perlu diadakan untuk menyokong kemajuan perekonomian Indonesia.

Tetapi sebagai seorang muslim yang taat, Hatta menyadari bahwa pembangunan bank ini tidak terlepas dari adanya bunga yang akan dipraktikkan bank-bank tersebut nanti. Dalam memandang bunga, Hatta menolak apabila bunga disamakan dengan riba, karena menurutnya, semangat yang dimiliki oleh bunga berbeda dengan semangat yang ada pada riba. Semangat bunga menurutnya adalah semangat yang produktif, yang mana uang tersebut digunakan untuk membuat perusahaan atau memajukan perusahaan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kemajuan perekonomian. Berbeda dengan bunga, semangat yang diusung riba adalah semangat yang konsumtif dan juga menghancurkan, dalam artian, orang tidak akan meminjam suatu uang dengan bunga bukan untuk berusaha, namun untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi orang yang meminjam tersebut. Hatta juga menganalisis bahwa timbulnya larangan riba disebabkan karena riba merupakan pintu gerbang awal menuju sebuah perbudakan. Hatta mengatakan :

"Jika kita perhatikan keadaan masyarakat, tatkala agama diturunkan Allah ke dunia. Di mana itu orang rata-rata hidup dalam masyarakat agrarian. Pertanian yang menjadi pokok yang terutama. Perniagaan hampir tidak dikerjakan orang biasa. Pertanian secara dahulu tidak memakai kapital, selain dari alat bekerja satu dua. Faktor usaha yang terutama ialah tanah dan pekerjaan manusia. Untuk mengerjakan tanahnya, orang tak perlu meminjam kapital, betapa juga miskinnya. Kapital tak perlu buat berusaha. Dan siapa yang meminjam uang, biasanya ia meminjam untuk keperluan hidupnya. Boleh jadi karena musim kemarau, pertaniannya tidak berhasil. Pinjamannya itu ialah pinjaman konsumtif, pinjaman buat ongkos makan. Bukan pinjaman produktif, untuk

berusaha. Oleh karena itu dipinjam untuk membeli barang makanan, maka sukar bagi si peminjam akan mengembalikannya kemudian. Apalagi jika ia diberati dengan rente yang tidak ringan. Kalau cuma jumlah rente yang dibayar Saban tahun atau Saban bulan atau Saban minggu induk utangnya tidak akan pernah lunas. Uang pengembalian utangnya itu mesti didapatnya kelak dari hasil tanahnya. Dan apabila hasil itu cukup buat dimakan saja, alangkah susah baginya memisahkan beberapa bagian untuk angsuran utangnya dengan rentenya. Waktu meminjam itu tidak dipikirkannya, dapat tidaknya ia mengembalikan utang itu kelak. Yang terasa benar baginya ialah keperluan sekarang, kesakitan hidupnya di waktu itu. Keperluan di masa datang masih kabur, bagi pandangan jiwanya. Asal dapat ia meminjam, segala peraturan si tukang riba diterimanya. Karena pinjaman itu sering terjadi, bahwa hartanya habis tergadai untuk pembayar utang. Maka harta habis sama sekali, utang dibayar dengan badan. Ia menjadi budak kepada orang tempat ia berutang. Di zaman berbudak itu, utang menjadi sebab perbudakan. Diwaktu itu orang yang meminjam, kebanyakan orang yang miskin, yang tidak mempunyai tanah buat hidup. Rente yang tidak terbayar sering menghilangkan, kemerdekaan si peminjam. Sebab itu tak heran, jika rente dilarang keras oleh agama.²⁵

Hatta juga melanjutkan bahwa bunga adalah bagian dari keuntungan yang dicapai dari usaha tersebut, Cuma caranya sedikit berbeda dengan pembagian keuntungan pada umumnya, seperti 50:50, namun pada bunga jumlah bagian itu ditetapkan terlebih dahulu yaitu sekian persen dari modalnya. Karena akan sangat sulit bagi bank yang melayani beratus-ratus transaksi kredit untuk menentukan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dengan orang sesorang, oleh karena itu pembayaran yang disertai bunga dalam pandangan Hatta lebih mudah dan rasional untuk dijalankan.²⁶

Hatta juga mengkritik para ulama yang mengusulkan agar bank menghindari pembayaran bunga kepada nasabah, melainkan membagikan keuntungan habis tahun

²⁵ Yayasan Idayu, *Op.cit.*, h. 103.

²⁶ *Ibid*, 105.

kepada mereka yang mempunyai andil dan uang simpanan. Akan tetapi usul ini, menurut Hatta sukar untuk dilakukan bagi bank yang banyak peraturan kreditnya, selain itu hal ini menyulitkan pekerjaan dan memperbanyak administrasi untuk menghitung bagian masing-masing dengan secara adil, seperti pembagian deposito yang beragam jangka waktunya, penyimpanan biasa dan lain sebagainya. Dalam menilai ulama yang mengajukan usul ini, Hatta secara tegas mengatakan bahwa usul ini tidak praktis.²⁷

Bank tanpa bunga, Hatta tidak dapat membayangkannya, akan tetapi lain lagi ceritanya apabila pengurus dan pegawainya semuanya orang kaya yang bekerja tidak mendapatkan upah akan tetapi hanya mengharapkan ridho Allah semata, akan tetapi sayangnya orang itu tidak ada (atau mungkin lebih tepatnya belum ada). Oleh karena itu Hatta secara tegas pula mengatakan, bahwa orang yang menolak bunga ini, lebih baik ia menolak kemajuan, sebab bank tidak akan ada bila tidak adanya bunga. Hatta mengatakan :

"Siapa yang tak suka kedudukan rente apa juga, lebih baik ia menolak kemajuan, menolak adanya bank. Perusahaan bank tidak terlepas daripada perhitungan rente. Itulah sendinya. Rente adalah bayaran atas pinjaman kapital."²⁸

Hatta juga mengkritik orang yang berpandangan bahwa bunga itu hanya berasal dari uang yang berlebih dari pinjaman, akan tetapi kalau uang itu digunakan untuk membeli rumah dan tanah dan menerimanya sebagai sewa tanah, hal itu tidak menjadi bunga. Menurut Hatta hal ini tidak ada bedanya dan sama saja. Hatta

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mohammad Hatta, *Op.cit.*, h. 59.

melanjutkan kritiknya kepada bank yang mengaku menolak bunga, akan tetapi, menutupinya dengan istilah "ongkos administrasi". Padahal hal itu sama saja dan tidak ada bedanya dengan bunga, yakni ongkos administrasi itu dihitung sekian persen dari jumlah pinjaman.

Melihat kenyataan tersebut, Hatta menganjurkan agar para ulama pada saat ini tidak hanya mempelajari masalah agama saja, akan tetapi juga mempelajari masalah sosial, ekonomi dari hukum, agar memahami perkembangan zaman. Dan Hatta juga memperingatkan para ulama agar tidak memperhatikan huruf dari larangan agama saja, melainkan semangat yang dibawa dan larangan tersebut.

Melanjutkan soal bunga ini, pada suatu segi hidup yang lain dalam perekonomian rakyat Indonesia, Hatta mengatakan bahwa bank pasar yang didirikan di beberapa tempat untuk orang kecil sudah termasuk riba. Ia mengambil contoh bahwa pada bank pasar tersebut seseorang membuat pinjaman f1 dengan rente 3 sen sehari selama 40 hari. Ini berarti 40 persen dalam 40 hari atau 360 % setahun- ini riba tegasnya. Rupanya soal tinggi rendahnya rente sangat berarti bagi Hatta dalam menilai rente itu sendiri.²⁹

B. Analisis Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Sebuah ciri khas yang unik serta menjadi benang merah dalam menganalisis pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, adalah sebuah kenyataan bahwa Hatta sangat menekankan moral dan akhlak. Penekanan moral dan akhlak dalam pemikiran ekonominya

²⁹ *Ibid.* h. 207.

bisa dilihat dalam dasar-dasar moral koperasi yang dikemukakan Hatta, yang mana boleh situ dari dasar-dasar moral tersebut, Hatta melarang koperasi untuk menjual barang yang palsu, dan memerintahkan untuk penggunaan ukuran timbangan yang benar dan terjamin. Pemikiran lain Hatta yang menekankan moral dan akhlak itu terlihat pula dalam salah satu tugas koperasi seperti memperbaiki distribusi untuk *meng-counter* pedagang yang menimbun barang, serta menyingkirkan penghisapan seperti menghapus sistem. ijon, yaitu sistem jual beli tanaman (terutama padi) yang masih belum masak dari masih di atas pohon.

Tidak hanya penekanan moral dan akhlak, pemikiran Hatta pun sarat dengan nilai-nilai, salah satunya nilai keadilan. Dalam nilai keadilan ini, terlihat benar (apabila kita mengamati pemikirannya), Hatta sangat menggandrungi cita-cita keadilan sosial dalam masalah ekonomi. Hal itu tidak mengherankan, karena lebih dari separuh hidupnya ia melihat dengan mata kepala sendiri dan sudah muak dengan kesengsaraan rakyat Indonesia yang tertindas dan perlakuan diskriminasi rasial dan sebutan "*inlander kotor*" yang dilakukan oleh kaum imperialis. Melihat latar belakang tersebut, agaknyanya bisa dipahami apabila ajaran sosialisme Karl Marx yang menentang eksploitasi dan penghisapan yang dilakukan kaum kapitalis menjadi inspirasi keadilan sosial Hatta disamping ajaran Islam dan demokrasi asli masyarakat Indonesia. Namun, walaupun Hatta menginspirasi Karl Marx, bukan berarti Hatta menerima dengan mentah-mentah ajaran tersebut. Dalam ajaran Karl Marx ini, Hatta jelas-jelas menolak dasar materialisme sebagai pandangan hidupnya.

Keadilan sosial yang merupakan tujuan dari demokrasi ekonomi dan menjadi corak berfikir Hatta, tidaklah berbeda dengan semangat keadilan yang dibawa ekonomi Islam.

Bahkan dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari keseimbangan dan kepemilikan. Dan dengan adanya nilai dasar keadilan ini, pemikiran Hatta yang memberikan stressing terhadap pekapan moral seperti larangan mencegah sistem ijon, mencegah penimbunan, serta menganjurkan koperasi untuk menggunakan timbangan yang benar sangat sesuai dengan nilai yang ada ekonomi Islam ini. Selain itu, dengan adanya nilai keadilan dalam perekonomian berarti mencegah seseorang berperilaku zalim kepada pihak yang lemah. Dalam Al-Quran secara eksplisit ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai universal, keadilan adalah kualitas intrinsik yang melekat dalam diri manusia. Seperti tertuang dalam Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang, yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8).³⁰

Dalam Islam, kelompok ekonomi lemah tidak dipandang sebagai sosok manusia pemalas, tidak sutra rneriabung atau berinvestasi, tetapi Islam memberikan perhatian dan be-pihak kepada mereka yang lemah secara ekonomis. Nampaknya memang sangat tidak logis jika keterbelakangan usaha ekonomi rakyat hanya dikaitkan dengan satu faktor saja. Sementara sejumlah faktor lain yang menjadi variabel utama tidak disentuh sama sekali.

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 154.

Faktor ketidakadilan dan model pembangunan misalnya, merupakan dua faktor penghambat bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi rakyat. Ketidakadilan sebagai salah satu faktor keterbelakangan usaha ekonomi rakyat berhasil dianalisis dengan sistematis oleh para sosiolog. Mereka memandang ketidakadilan sebagai penyebab keterbelakangan bahkan kemiskinan dalam suatu masyarakat, baik ketidakadilan dalam kepemilikan alat produksi maupun pemerataan hasil produksi. Model pembangunan juga dipandang sebagai faktor usaha yang baik untuk dipertimbangkan. Model pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi akan melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan suatu kelompok masyarakat.

Mengingat begitu esensialnya masalah keadilan, sehingga nabi sendiri dengan tegas melarang para petani di desa-desa melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang kota yang diyakini melakukan tindakan eksploitasi. Dan masalah keadilan inipun diamini oleh ekonom muslim, Ibnu Khaldun, yang menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan disamping masyarakat dan pemerintah.

Lalu masih mengenai perihal keadilan, konsep yang ditawarkan Hatta mengenai penetapan upah minimum yang adil bagi setiap pekerja oleh negara, kurang lebih hampir serupa dengan konsep perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi Islam. Konsep perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi Islam, juga masuk kategori penekanan prinsip keadilan dalam nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Tujuan dari penetapan upah yang adil juga dinyatakan seorang penikir ekonomi Islam masa Haski, Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa tujuan dasar dari upah yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan

majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi.³¹ Begitu juga dengan Dr. Yusuf Qardhawi, yang mengatakan bahwa pengaturan upah yang adil bagi kaum buruh, menjamin kerja sama yang baik antara buruh dan majikan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak yang kuat (majikan) terhadap pihak yang lemah (buruh).³²

Selain nilai keadilan, Hatta juga menyisipkan beberapa nilai-nilai lainnya dalam pemikirannya. Nilai tersebut ialah nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas dan gotong-royong dalam berekonomi, yang mana nilai-nilai tersebut dimanifestasikan dalam bentuk koperasi. Dalam pemikiran koperasinya, Hatta pun tidak segan-segan mengatakan bahwa persekutuan koperasi adalah sebuah persekutuan keluarga besar.

Sebagaimana halnya dengan pemikiran Hatta, ekonomi Islam juga menekankan kerjasama dan gotong-royong, yang mana dalam ekonomi Islam kerjasama dan gotong-royong termasuk ke dalam bagian nilai-nilai instrumental ekonomi Islam. Dengan gotong-royong dan kerjasama inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran pada diri orang yang melakukan kerjasama tersebut, bahwa ia tidak akan mampu berbuat banyak apabila dalam hidupnya tidak terdapat orang lain di sekelilingnya. Kesadaran ini pun menjadi penting dan menjadi benih dalam menumbuhkan semangat tolong-menolong dan persaudaraan terhadap orang saling bekerjasama tersebut. Ibnu Khaldun, seorang sarana ekonomi Islam, juga mengatakan bahwa di dalam masyarakat solidaritas sangat diperlukan untuk meningkatkan kerja sama, sehingga dengan solidaritas tersebut akan meningkatkan produktivitas dalam masyarakat itu sendiri.

³¹ Adiwarman. A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 363.

³² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1994), h. 174.

Selanjutnya, Hatta mengeluarkan politik ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk menaikkan daya beli masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mau tidak mau, segala aktivitas produksi harus digalakkan. Dengan menggalakkan aktivitas produksi tersebut, berarti negara harus menciptakan kesempatan kerja bagi rakyatnya. Dalam menaikkan aktivitas produksi bagi negara, terlihat pemikiran yang dikemukakan Hatta, bahwa ia sangat mementingkan kemajuan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menciptakan koperasi sebagai instrumennya. Pemikiran lain Hatta untuk menaikkan aktivitas produksi ialah dengan mengadakan konsep transmigrasi dan pembukaan hutan di tanah seberang. Konsep transmigrasi yang berarti pemindahan penduduk secara besar-besaran bukan berarti pemindahan yang asal-asalan, tetapi pemindahan yang lengkap susunannya, dan terdiri dari berbagai macam spesifikasi profesi dan keahlian.

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban *imaratul kaum*, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk.³³ Rasulullah sebagai kepala negara juga menekankan pentingnya aktivitas produksi. Hal itu bisa dibuktikan dengan tindakan Rasulullah kemudian yang menerapkan kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin sekaligus peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin dengan mengimplementasikan akad *muzara'ah*, *musaqat*, dan *mudharabah*. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan menghasilkan pemanfaat sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Selain itu, Rasulullah Saw, juga membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk pembangunan pemukiman yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi

³³ *Ibid.* h. 258.

kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah. Sehingga kesejahteraan umum kaum muslimin mengalami peningkatan.³⁴

Islam menilai kemajuan ekonomi bukan dengan indikator pertumbuhan GNP (*Gross National Products*), tetapi sejauh mana memberikan peluang-peluang ekonomi yang semakin besar kepada rakyat. Oleh sebab itu, sektor riil lebih diutamakan dari pada sektor moneter yang hanya menciptakan perputaran uang diantara kelompok tertentu saja. Hal ini sekaligus membuktikan, sasaran ekonomi dalam Islam adalah manusia sebagai prioritas utama bukan ekonomi itu sendiri. Islam memandang bahwa betapapun berkembangnya ekonomi kalau tidak mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia sama saja tidak ada artinya. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam aktivitas, produksi yang dilakukan harus merata sehingga pada akhirnya perputaran uang di suatu negara pun akan lancar dan seimbang.

Islam juga mengemukakan pandangan pentingnya spesialisasi pekerjaan, Al-Ghazali, cendekiawan muslim ^{mana} ^{klasik} juga mengeluarkan pendapat yang serupa. ^{لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ} dengan Hatta dan turut menekankan pula gagasan mengenai spesialisasi pekerjaan dan saling ketergantungan dalam bekerja. Dalam pandangan Islam penempatan orang harus sesuai dengan bidang yang dimilikinya dan Islam pun melarang untuk menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya.

Pemikiran ekonomi Hatta lainnya yang patut dicermati adalah masalah pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (jaminan sosial) oleh negara, yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ekonomi Islam, jaminan sosial menjadi bagian

³⁴ *Ibid.* h. 152.

tersendiri dari nilai-nilai instrumental ekonomi Islam. Konsep jaminan sosial dalam Islam berarti negara memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan perumahan tiap individu rakyatnya termasuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan.

Selanjutnya pemikiran ekonomi yang ditawarkan Hatta yang lain yang cukup menonjol adalah konsep kedaulatan rakyat yang berkenaan dengan penguasaan masalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh negara dan dikelola yang mana keuntungan dari pengelolaan tersebut Peruntakkan untuk kemakmuran rakyat seluruhnya. Oleh karena itu, dalam kedaulatan rakyat ini, distribusi kekayaan dan barang dalam pandangan Hatta merata.

Dalam pandangan Islam, paham kedaulatan rakyat memang sangat luas. Sama dengan Hatta, dalam Islam, dasar musyawarah bukan hanya dilakukan dalam, hal politik, tetapi juga meliputi soal-soal ekonomi. Bukanlah hanya pemerintahan dan politik negara saja yang mesti tunduk pada hukum musyawarah, tetapi sistem perekonomian dan pengawasan jalannya kemakmuran rakyat, haruslah tunduk dibawah hukum kedaulatan rakyat. Oleh karena itu serupa dengan pemikiran Hatta, dalam ekonomi Islam, segala cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola oleh negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa segala kekayaan alam yang ada di jagat raya ini pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah, manusia bukanlah pemilik hakiki dari alam ini, akan tetapi manusia hanya mempunyai hak pakai dan hak kelola. Atas dasar inilah ekonomi Islam tidak membenarkan adanya praktik monopoli, dan merupakan landasan awal dalam hak negara untuk mengelola cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemikiran pengelolaan oleh negara ini dalam ekonomi Islam mendapat kedudukan yang

sangat penting, yakni termasuk ke dalam nilai dasar pemilikan dalam nilai-nilai dasar yang harus ada dalam ekonomi Islam. Tidak hanya nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, peranan negara dalam mengelola cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan juga termasuk nilai-nilai instrumental dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya mengenai pendapat Hatta yang berkenaan dengan bunga bank seperti yang dijelaskan yang di poin sebelumnya, bahwa Hatta menolak apabila bunga disamakan dengan riba, karena menurut Hatta semangat yang dibawa riba adalah semangat konsumtif, bukan semangat produktif. Karena semangat yang dibawa riba adalah semangat konsumtif, bukan semangat produktif, maka Hatta mewajarkan apabila peminjam memungut bunga atas pinjaman yang diberikannya. Hatta melanjutkan bahwa bunga membawa semangat yang membangun (perekonomian), berbeda dengan riba yang membawa semangat menghancurkan (perekonomian) dan riba menurut Hatta sendiri yang dalam hal ini pemungutan imbalan atas pinjaman untuk keperluan konsumtif adalah sesuatu yang dilarang.

Dalam menilai pandangan Hatta dari kaca maka ekonomi Islam ini, maka perlu dianalisis terlebih dahulu mengenai semangat produktif yang dibawa Hatta, dan menilai apakah pandangan Hatta ini terdapat nilai keadilan atau tidak. Dalam menilai pinjaman produktif, ada baiknya apabila penulis mengutip pendapat Afzalur Rahman yang mengungkapkan bahwa dalam pinjaman produktif, yang mana pinjaman tersebut untuk memulai atau membangun suatu usaha, maka hanya terdapat dua kemungkinan yaitu memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Lalu bagaimana jika peminjam menjalankan bisnisnya mengalami kerugian, bagaimana dan dengan landasan apa kreditor dibenarkan menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam?. Dan

apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari besarnya bunga setiap bulan atau tahun, maka bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagian, sedangkan ia sendiri tidak melakukan apa-apa sementara peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktunya, tenaga, kemampuan dan modal pribadinya, setelah pengorbanan itu semua tidak memperoleh apa-apa.³⁵

Kalaupun keuntungan yang diperoleh peminjam itu lebih besar dari jumlah bunga yang harus dibayarkan, tidak dibenarkan baik dengan akal, rasa keadilan prinsip-prinsip perdagangan dan ekonomi bahwa pedagang, industrial, petani serta faktor-faktor produksi lainnya yang telah menghabiskan waktu, tenaga, kemampuan dan sumber lain daripada jasmani dan mentalnya, untuk mengeluarkan atau menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat, yang kemungkinan memperoleh keuntungan tidak tetap, sedangkan sang pemberi modal memperoleh jaminan bunga yang tetap dan pasti. Semua pihak mempunyai resiko menderita kerugian, tetapi pemilik modal memiliki jaminan bunga yang pasti. Besarnya keuntungan bagi semua agen mengalami naik turun sejalan dengan perubahan harga bunga tetapi bunga bagi kaum bermodal tetap saja dan dibayar secara tetap setiap bulan atau setiap tahun dalam keadaan bagaimanapun. Tetapi jika kreditor menginginkan modalnya harus diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan sehingga memungkinkan ia memperoleh keuntungan, satu-satunya cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan memasuki suatu partnership, dengan bisnismen, dan bukannya, dengan meminjamkan modal dengan menarik bunga.³⁶

³⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 60

³⁶ *Ibid*

Para pelopor pemikiran yang mengatakan bahwa dengan "menunggu" atau "menahan diri" dalam suatu periode tertentu dan tidak menggunakan modalnya sendiri untuk memenuhi keinginannya sendiri, kreditor memberikan "waktu" kepada peminjam untuk menggunakan modalnya untuk memperoleh keuntungan. "waktu" itu sendiri mempunyai "harga" yang meningkat sejalan dengan periode waktu. Jika peminjam tidak diberikan batasan waktu untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan modal yang dipinjamnya, ia tidak akan mampu memperoleh keuntungan dan bahkan seluruh bisnisnya bisa hancur karena kekurangan modal. Masa dimana peminjam menginvestasikan modalnya, mempunyai "harga" tertentu baginya dan ia akan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. Maka tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menikmati sebagian dari keuntungan peminjam. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan naik turunnya keuntungan sejalan dengan naik turunnya waktu dan tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh mengenakan harga (waktu) sesuai dengan lamanya waktu.³⁷ Tetapi lagi-lagi pertanyaan bagaimana dan dari mana sumbernya kreditor itu mendapatkan informasi bahwa peminjam itu nyata-nyata memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian dengan investasi modal pinjamannya itu?. Bagaimana ia mengetahui bahwa peminjam itu akan memperoleh keuntungan yang pasti sehingga dengan begitu ia menetapkan bagian keuntungan tersebut?. Dan bagaimana dapat memperhitungkan bahwa peminjam pasti akan memperoleh keuntungan yang begitu banyak selama masa modal digunakannya sehingga ia akan membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun?. Para pendukung teori bunga ini tidak mampu memberikan jawaban masuk akal terhadap masalah tersebut.³⁸

³⁷ *Ibid.* h.61

³⁸ *Ibid.*

Senada dengan pendapat Afzalur Rahman, Ibrahim Lubis, secara lebih gamblang mempertanyakan pendapat Hatta, yaitu bagaimana jika kreditur mengalami kerugian, apakah dalam hal ini, kreditur harus membayar juga bunganya kepada debitur (bank)? dan maukah yang mempunyai uang (bank) ikut rugi atau maukah ia hanya terima uangnya yang pinjankan itu saja?. Dalam praktiknya tentu si debitur (bank) tak mau ikut rugi dan ia tak mau menerima begitu saja, ia harus minta lagi tentunya, ia tak mau tahu apakah orang itu rugi atau untung dan ia hanya tahu bahwa uangnya dalam jangka masa yang tertentu harus mendapatkan bunga sekian persen. Dan kalau ia tidak menuntut haknya memungut bunga itu, tentu bukan bank namanya dan tentu bertentangan dengan moneter ekonomi yang dalam teorinya, mengeluarkan tenaga yang sedikit dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.³⁹

Lalu mengenai pendapat Hatta, yang mengatakan bunga membawa semangat yang membangun, menurut penulis Hal ini tidaklah benar dan relevan. Para ekonom sekarang justru telah menyadari secara empiris, bahwa bunga mengandung kemudharatan dan membawa semangat yang menghancurkan. Afzalur Rahman dalam bukunya, "Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3", mengatakan bahwa paling tidak terdapat 4 keburukan dari adanya praktik bunga bank,⁴⁰ yaitu :

1. Adanya tingkat bunga yang tinggi menghancurkan minat untuk berinvestasi. Ketika tingkat investasi jatah, maka kesempatan kerja dan pendapatan pun akan menurun. Sebagai akibat menurunnya jumlah pendapatan maka akan menyebabkan tingkat konsumsi agregat menjadi turun. Kita mengetahui bahwa konsumsi merupakan satu-

³⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid II*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1995), h. 527

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Op.cit.* h. 124-132

satunya tujuan dari seluruh kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, suatu penurunan tingkat investasi, juga berarti penurunan kesempatan kerja akan mengurangi permintaan terhadap barang serta produk-produk industri dan pertanian dalam suatu negara. Akibatnya, kemajuan perdagangan dan industri sekaligus pertumbuhan modal di negara tersebut akan terhambat. Hal itu tidak mengherankan, karena bunga atas modal merupakan penghambat produktivitas. Bunga, dalam bahasa ilmiah, merupakan hambatan terhadap efisiensi marginal modal. Apabila efisiensi marginal modal berkurang hal itu akan menjadikan beberapa sumber yang produktif terbengkal. Dua akibatnya yaitu di satu pihak, terbatasnya penggunaan sumber-sumber yang produktif menurunkan jumlah barang yang diproduksi. Dengan adanya pungutan bunga, biaya marginal produksi menjadi naik. Dengan demikian, barang-barang yang diproduksi harus dijual dengan harga yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang.

2. Para ahli ekonomi beranggapan bahwa yang yang mengendap di bank tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha industri dan komersial. Tetapi dalam praktiknya anggapan tersebut, menurut Afzalur Rahman, tidaklah benar. Karena sebagian aset bank dialirkan pada usaha-usaha non produktif, seperti berinvestasi dengan surat-surat jaminan pemerintah, menggunakan uang untuk tujuan spekulatif dan tagihan tunai. Bersamaan dengan itu bank cenderung membatasi banyaknya orang yang ingin menginvestasikan uangnya secara langsung di bidang industri dan komersial. Hal ini menyebabkan berkurangnya modal yang tersedia yang seharusnya dapat digunakan untuk sektor-sektor produktif.
3. Bunga menghancurkan kekayaan dengan berbagai cara. Bunga membantu timbulnya krisis ekonomi di dunia kapitalis. Hal ini terjadi ketika ada penumpukan barang]:arena

rendahnya daya beli dan adanya rendahnya kecenderungan konsumsi. Proses produksi menjadi terhambat dan menyebabkan pengangguran. Selagi keadaan ekonomi terus melambung, sejumlah besar uang dipinjamkan dengan bunga yang diinvestasikan pada usaha yang produktif akan memberikan hasil yang mencukupi. Optimisme yang berlebihan meningkatkan permintaan dan pinjaman dan akhirnya menaikkan suku bunga. Optimisme akan berakibat pada spekulasi dan terus berspekulasi. Semua ini menaikkan suku bunga, margin keuntungan akan semakin sedikit tetapi produsen dengan penuh keyakinan terus memproduksi. Secara berangsur-angsur keraguan mulai timbul berkaitan dengan hasil produktif ketika stok barang tahan lama, akan bertambah secara tetap. Kemudian keseimbangan tersebut akan berkembang dengan cepat. Karena takut mengalami kerugian, bank menaikkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan mencoba untuk menarik kembali pinjaman yang telah diberikan pada waktu lalu. Dengan demikian akan menimbulkan kepanikan di kalangan dunia usaha sekaligus meningkatkan pengangguran. Dalam situasi demikian, aktivitas akan terhenti dan di pasar hanya akan ada timbunan barang yang tidak ada peminatnya. Oleh karena adanya suku bunga yang tinggi harga barang melambung sementara efisiensi marginal modal menyusut sebagai akibat kegiatan spekulasi dan lainnya, sehingga keuntungan akan merosot. Jatuhnya efisiensi marginal modal tidak diragukan lagi merupakan dasar timbulnya masalah krisis tetapi kenaikan suku bunga merupakan biang keladit timbulnya seluruh persoalan tersebut. Dengan jatuhnya efisiensi marginal modal dibanding dengan naiknya biaya sebagai akibat dari naiknya tingkat bunga, tingkat investasi menjadi menurun. Apabila tidak ada pengurangan bunga efisiensi marginal modal dalam berbagai tingkat akan memberikan keuntungan dan segala macam krisis tidak akan timbul.

4. Bunga juga memusnahkan kekayaan negara. Ini biasa dialami di negaranegara kapitalis, dimana produsennya bermaksud menghancurkan barang jadi dalam jumlah yang besar bahkan hasil-hasil pertanian dengan tujuan menyelematkan harga dari kejatuhan dibawah biaya marginal produksi. Kerugian negara dalam jumlah besar sementara berjuta orang menderita kelaparan dan kekurangan keperluan lain akan karena rendahnya daya beli. Hal ini dapat dihindarkan dengan menghapus tindakan sistem bunga. Tindakan ini tidak hanya akan menurunkan marginal produksi malahan akan meningkatkan investasi yang sekaligus menaikkan daya beli masyarakat.

Dari penilaian yang diuraikan diatas terhadap pemikiran Hatta mengenai bunga bank tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Hatta yang satu ini bertentangan dari kacamata ekonomi Islam.

Tetapi tidak adil rasanya, kalau kita dengan serta merta menghujat Hatta, untuk pemikirannya yang satu ini. Bahkan penulis menganggap, disinilah letak kebesaran pribadi seorang Hatta, ketika ia mendapati jalan pembangunan itu hanya dapat ditempuh dengan mendirikan bank, ia tidak serta merta lari dan menafikan bunga tersebut, ia juga tidak melakukan perbuatan seperti politisi pada umumnya yang mengeluarkan pendapat mengenai bunga bank ini dengan pendapat yang abu-abu, ia secara jantan menghadapi dilema tersebut dan mencoba berijtihad dengan mempelajari asal-muasal riba itu diharamkan dan alasan mengapa bunga itu diharamkan sehingga sampailah ia sebuah keputusan yang sulit, penulis kira, yaitu bunga bank tidaklah sama dengan riba. Namun walaupun begitu, penulis meyakini, seandainya Hatta bisa melihat keadaan saat ini, dimana bank pun bisa beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga, penulis kira, Hatta pun akan kembali menarik ucapannya. Karena bagi seorang intelektual seperti Hatta, dia akan dengan legowo

mengakui bahwa dia akan mengakui bahwa teorinya yang telah diyakininya disanggah dengan suatu teori yang lebih benar dan relevan.

Selanjutnya menurut hemat penulis, untuk menilai Hatta secara utuh, kita harus melihat juga kondisi sosial dan ekonomi yang semasa kehidupan Hatta dahulu. Pada masa Hatta dahulu, Indonesia saat itu sangat miskin, terbelakang akibat penjajahan yang mendera bangsa ini berabad-abad lamanya. Negara yang masih miskin ini tentu untuk menyelenggarakan pembangunan harus memerlukan sebuah modal awal, dan fungsi untuk mengumpulkan modal yang besar ini hanya dapat diemban oleh bank, sementara pada masa dahulu, praktik mudharabah belum dikenal seperti masa sekarang ini. Melihat keadaan tersebut, maka wajarlah rasanya apabila Hatta pun berpendapat bahwa untuk menuju kemakmuran, negeri ini harus mendirikan sebuah bank.

Kemudian dalam memandang bunga yang menjadi instrument dalam bank ini bukan berarti Hatta menafikan keberadaannya, terlihat dalam didalam bukunya yang berjudul "Beberapa Pasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Bank", Hatta memberikan perhatiannya yang cukup besar terhadap bunga (apakah dapat disamakan dengan riba atau tidak) yaitu sebanyak 3 bab dari keseluruhan buku tersebut yang sebanyak 15 bab.

Apabila kita membaca buku tersebut, tampak jelas bahwa Hatta mengalami pergolakan batin yang begitu dalam, serta menjalani perenungan yang cukup panjang. Sebagai muslim yang taat, ia menyadari bahwa praktik riba adalah sesuatu yang dilarang, akan tetapi ia memerlukan suatu bank untuk memperbaiki keadaan ekonomi bangsa ini. Oleh karena itu, ia mempelajari aspek sosiologis dan historis, mengapa riba tersebut diharamkan, dan ia menyimpulkan bahwa pada masa dahulu pinjaman riba digunakan hanya untuk

kepentingan konsumsi, bukan untuk produksi serta terlebih lagi riba pada masa dahulu merupakan gerbang dari awal pintu perbudakan. Dengan berdasarkan kesimpulan tersebut dan disebabkan juga, belum menjamurnya praktik mudharabah seperti dewasa ini, maka Hatta pun berijtihad bahwa bunga bank merupakan suatu yang hal yang berbeda dengan riba, dan menjadi halal hukumnya, serta secara tegas ia mengungkapkan bahwa siapapun yang menolak bunga, maka lebih baik ia menolak sebuah kemajuan.

Dengan memperhatikan kesimpulan Hatta tersebut, serta juga melihat kondisi sosial dan ekonomi pada masa itu, maka tidak aneh apabila Hatta mengungkapkan kritiknya terhadap praktik bank Islam yang menggungkan ongkos administrasi dalam operasionalnya. Dalam masalah ongkos administrasi ini, penulis sepakat dengan pendapat Hatta yang mengatakan itu tidak ada bedanya dengan praktik bunga pada umumnya (yang tentu dinilai riba), karena ongkos administrasi pada hakikatnya hanya merupakan kanuflase saja untuk mendukung praktek riba yang dilakukan oleh bank Islam tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, yang paling menonjol adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud Hatta disini, bahwa rakyat mempunyai kedaulatan dalam hal berekonomi, karena itu segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, dengan adanya demokrasi ekonomi inilah yang pada akhirnya akan melahirkan koperasi sebagai instrumen untuk membangkitkan ekonomi rakyat serta menjadi titik tolak negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik ekonominya.
2. Bahwa pada dasarnya pemikiran ekonomi Mohammad tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, namun ada juga pemikiran Hatta yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam yaitu pemikiran Hatta mengenai bolehnya melakukan praktik bunga dalam bank. Namun demikian, pemikiran Hatta mengenai bolehnya praktik bunga bank ini, kiranya dapat dimaklumi karena keadaan kondisi ekonomi indonesia saat ini sedang terpuruk pasca penjajahan, dan tentunya untuk membangun negeri yang sedang terpuruk diperlukan sebuah bank. Sementara di satu sisi pada masa itu belum adanya praktik bank syariah yang berkembang pada masa dewasa ini.

B. Saran

Adapun saran sebagai hasil dari analisis dan pertimbangan kesimpulan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang dalam hal ini pelaksana pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, untuk turut serta dalam menggali wawasan dan kajian-kajian pemikiran asli Indonesia.
2. Kepada para cendekiawan dan pemikir ekonomi Islam untuk terus menggali pemikiran-pemikiran ekonomi dari pemikir Indonesia, sebagai upaya konseptualisasi dan aplikasi sistem ekonomi yang relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia.
3. Pemikiran-pemikiran Hatta di bidang ekonomi sebagai Founding Father Indonesia ada baiknya untuk di tinjau kembali oleh pemerintah. Pemikiran-pemikirannya seperti penggalakan koperasi, transmigrasi, penguasaan aset nasional untuk kepentingan masyarakat serta jaminan sosial kepada rakyat dilaksanakan kembali. Bahkan menurut penulis, pemikiran-pemikiran Hatta merupakan sebuah amanat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menghormati dan menjalankan pemikiran Hatta sebagai pendiri dari Republik ini.
4. Selanjutnya, penulis mengharapkan agar di masa yang akan datang. Penelitian mengenai sosok Mohammad Hatta ini terus dilanjutkan dan bila perlu diperbandingkan dengan pemikir-pemikir ekonomi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Jakarta : LP3M STIE Ahmad Dahlan. 2008.
- Adams, Ian. Ideologi Politik Mutakhir. Yogyakarta : Penerbit Qalam. 1993.
- Ahimsa RiyadL Dedi. Hatta. Hikayat Cinta dan Kemerdekaan. Depok Edelweiss. 2010.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Karim. Sistem, dan Tujuan Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Ali, Muhammad Daud. System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf Jakarta : UT Press. 1998.
- Amalia, Euis, sejarah pemikiran ekonomi iviatli dari masa klasik hingga kontemporer. Jakarta : Pustaka Astaaruss Jakarta. 2005.
- An-Nabhani, Taqyuddin. Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam. Surabaya : Risalah Gusti. 1999.
- Arief, Sritua. Ekonomi Kerakyatan Indonesia .- Mengenang Bung Hatta, Bapak EKonomi Kerakyatan Indonesia. Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2002.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1999.
- Farida Swasono, Meutia. Bung Halta, Pribadinya dalain Kenangan. Jakarta Sinar Harapan Bekerja sama dengan Universitas Indonesia. 1980.
- Hatta, Mohammad. Koperasi Membangun do dan Membangun Koperasi. Jakarta : PT. Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Rayat. 1971.
- Kumpulan Pidato II. Jakarta : PT Toko Gunung Agung. 2002. Gunung
- Kumpulan Pidato III. Jakarta : Toko Buku Gunung Agung. 2002.
- Memoir. Jakarta : PT Tintamas Indonesia. 1979.
- Pengantar ke Jalan Ekonomi Perusahaan. Jakarta : Mutiara Offset. 1981.
- Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia Jakarta: Djambatan.

Kumpulan Pidato I. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung 2002.

<http://Hindonesiafile.com/index?option=com-content@task=view&id=108&Itemid=40>

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Hatta>

<http://www.grelovejogja.wordpress.com/2006/12/09/mohammad-hatta/>

<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopediaAatta/index.shtml>

Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: BIT Indonesia. 2002.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Jakarta : PT. Raja Garafindo Persada. 2006.

Lubis, Ibrahim. Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid 11. Jakarta : Kalam Mulia. 1995.

Naffs, Anas. Pernik-Pernik Perjalanan Politik Rotterdam-Bandaneira. 2002.

Noes, Deliar. Muhammad Haifa Biografi Politik. Jakarta : LP3ES. 1990. Noor,

A.S. Mohammad. Generasi Soekarno – Haifa. Jakarta : UI Press. 1985.

Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta : Gema Insani Press. 1997.

Peron Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Rabbani Press. 1995.

Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 11. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.

. Doktrin Ekonomi Islam Jilid III. Jakarta : Dana Bakti Wakaf 1995.

Rose, Mavis. Biografi Politik Mohammad Hatta. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1991.

Sacfl'uddin, M. Ahmad. studi nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam. Jakarta : Media Dakwah. 1984.

Sami' Al-Mishri, Abdul. Pilar-pilar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2006.

Sasono, Adi. Prospek Dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Jakarta: PT Pinbuk. 2000.

- Sideman, Zulfikri. Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. 2010
- Suma, M. Amin. Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam. Ciputat: Kolam Publishing. 2008.
- Swasono, Edi. Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat. Jakarta : Yayasan Hatta. 2002.
- Wijaya, I. Wangsa. Mengenang Bung Hatta, Cetakan Ke-II. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung. 2002.
- Yayasan Idayu. Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Jakarta : PT. Idayu Press.
- Bung Hatta Kita Dalam Pandangan Masyarakat. Jakarta : Idayu Press. 1982.
- Ekonomi Kerakyatan Indonesia : Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Jakarta : Idayu Press. 2002.